

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2024 NOMOR 25

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 29 JULI 2024

NOMOR : 25 TAHUN 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2024



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa ...

- b. bahwa hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta capaian prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah masih dibawah target;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun;

- Mengingat :
- 1. Undang-Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Nomor 16);
20. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Berita Daerah Kota Sukabumi Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024.

Pasal I ...

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 55), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Perubahan RKPD ini menguraikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2024 dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 25 TAHUN 2024

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024.
.....

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen perencanaan tersebut terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah untuk disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.

Secara umum, dokumen Perubahan RKPD mempunyai nilai penting, antara lain:

1. merupakan instrumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024–2026;
2. menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah;
3. mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026;
4. menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dalam penyusunan Rancangan perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun 2024; dan
5. menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada Perubahan RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Triwulan I di Lingkungan Kota Sukabumi yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu didapatkan data-data sebagai berikut:

1. Indikator makro masih belum ada realisasi pada Triwulan II ini, dan baru akan bisa diketahui ketika Triwulan IV, namun demikian harus diwaspadai beberapa indikator makro yang masih belum tercapai pada Tahun 2023 yaitu indeks gini/Gini Rasio dari target 0,42 realisasi 0,45 hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan penduduk Kota Sukabumi;
2. Beberapa capaian indikator makro masih cukup rendah dibandingkan rata-rata Provinsi dan nasional walaupun secara target RKPD sudah tercapai;
3. Masih terdapat Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang capaiannya masih dibawah 50 (lima puluh) persen, serta terdapat pula yang masih belum bisa dilakukan pengukuran;
4. Realisasi anggaran Perangkat Daerah masih banyak yang dibawah 50 (lima puluh) persen terutama Perangkat Daerah yang memiliki anggaran bersumber Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi atau yang berupa kegiatan fisik infrastruktur;
5. Pencapaian indikator kinerja outcome dan output masih banyak yang belum tercapai bahkan belum mencapai 50 persen dari target yang ditentukan, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dan atau strategi lain untuk mencapai target tersebut.

Di sisi lain berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata pada Tahun 2023 Kota Sukabumi terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 51.564.237.117,- (Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) yang terdiri dari SiLPA yang diarahkan dan yang tidak diarahkan. SiLPA tersebut tentunya harus dilakukan penyesuaian dan dipergunakan pada Perubahan RKPD terutama untuk SiLPA yang diarahkan seperti yang berasal dari BLUD Rumah Sakit, BLUD Selabatu, RSUD Al-Mulk dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi serta adanya SiLPA hasil audit tersebut, maka sebagaimana amanah ketentuan perundang-undangan pada Tahun 2024 ini Pemerintah Daerah Kota Sukabumi akan melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang tentunya harus diawali dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi masih harus mempertimbangkan adanya agenda nasional yaitu Pemilihan Kepala Daerah (27 November 2024), karena itu dalam Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 perlu dicantumkan pokok-pokok penyesuaian yang akan dilakukan dalam proses persiapan agenda besar tersebut serta dampak transisi yang akan dihadapi.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Sukabumi periode 2024-2026. Adapun tema pembangunan yang diambil pada penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah **Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan**. Dengan demikian maka penyusunan Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 akan ditujukan secara maksimal dalam mewujudkan tema tersebut. Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu **Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat** serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Pada prinsip ketiga tema tersebut bertujuan untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui peningkatan kondusifitas demi mempercepat tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh unsur masyarakat.

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun yang sama sebagai dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan (KUPA-PPASP) Tahun Anggaran 2024, dimana KUPA dan PPASP ini merupakan Kebijakan Umum APBD yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Sukabumi sebagai pedoman penyusunan

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 178 ayat (2), Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Dengan demikian, RKPD dan Perubahannya mempunyai fungsi pokok:

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RPAPBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinergi perencanaan dan penganggaran Kota Sukabumi.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2024 adalah:

1. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Tahun Anggaran 2024, serta Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2024.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2024;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang Undang Nomor 06 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, Nomor 22 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022 – 2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16).

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Sukabumi dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Kondisi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi awal dengan perkembangan keadaan yang melatarbelakangi pentingnya penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 seperti asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan yang memerlukan perubahan berupa pergeseran kegiatan di dalam lingkup internal Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, sehingga diharapkan dengan dilaksanakannya RKPD

Perubahan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan dan penganggaran.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024, disajikan dalam sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2024
- III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2024

Evaluasi pembangunan daerah pada buku ini menjelaskan tentang indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Hasil Evaluasi akan memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi pembangunan daerah melalui merupakan data dan informasi yang menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1.1. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu

indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

Laju pertumbuhan PDRB dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 9.801,88 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 477,72 miliar rupiah dari 9.324,16 miliar rupiah pada tahun 2022 Sementara pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. Kondisi perekonomian tampak berjalan relatif stabil di Kota Sukabumi selama 2 tahun terakhir, dengan nilai pertumbuhan dikisaran 5 persen.

Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 9,08 persen. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas 5 persen. Sementara enam lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif yang lebih rendah.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga delapan persen tersebut antara lain: lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,04 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum sebesar 7,81 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,71 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,17 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,85 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,17 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,79 persen, dan lapangan usaha Real Estate sebesar 5,54 persen.

Sedangkan enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,64 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar

Dan Eceran, Reparasi Mobil sebesar 3,80, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,33 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,19 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,09 persen serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 2,07 persen.

Berikut disajikan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha:

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sukabumi
Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	0,62	0,76	3,58	7,17
Indusri Pengolahan	5,30	-1,93	2,49	4,81	4,64
Pengadaan Listrik dan Gas	2,95	2,99	8,98	5,90	3,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,60	6,85	8,02	6,32	2,09
Konstruksi	7,09	-4,06	4,00	-0,15	6,85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,69	-2,68	3,64	5,47	3,80
Transportasi dan Pergudangan	7,17	-6,98	3,41	7,59	9,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,01	-3,41	2,74	9,70	7,81
Informasi dan Komunikasi	8,75	10,78	8,23	7,01	6,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,58	2,81	4,79	2,57	3,33
Real Estat	8,16	-0,86	7,76	6,30	5,54
Jasa Perusahaan	7,37	-7,67	7,87	9,13	8,04

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,21	-3,93	-2,76	-0,34	2,07
Jasa Pendidikan	6,34	4,39	2,88	8,09	5,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,49	1,82	7,82	9,85	5,72
Jasa lainnya	9,15	-0,82	1,42	11,67	7,71
Produk Domestik Regional Bruto	5,53	-1,49	3,71	5,35	5,12

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

2.1.1.2. PDRB per Kapita

Data PDRB Kota Sukabumi yang disajikan adalah PDRB dari sisi produksi atau juga dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha, yang diperoleh melalui penjumlahan nilai tambah seluruh lapangan usaha. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dengan tujuan untuk melihat struktur (distribusi) perekonomian.

Secara umum, PDRB per Kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 37,93 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 42,56 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota Sukabumi juga

mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga 2023, masing-masing sebesar 26,53 juta rupiah dan 27,18 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena dalam hal ini pengaruh inflasi sudah tidak ada lagi. Berikut disajikan Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Tahun 2019-2023:

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi
Tahun 2019-2023

Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB	12.387.691,54	12.401.540,58	13.053.044,18	14.192.254,06	15.349.709,36
ADHK	8.664.017,06	8.534.716,50	8.851.051,49	9.324.164,63	9.801.880,80

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

Tabel 2.3
PDRB Perkapita Kota Sukabumi Tahun 2019-2023

PDRB Perkapita (Rupiah)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB	37.927.735,70	35.925.772,04	37.278.009,63	39.931.275,25	42.561.942,04
ADHK	26.526.859,19	24.724.047,59	25.277.596,39	26.234.436,27	27.178.826,77

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

Tabel 2.4
Persentase Pertumbuhan Perkapita Kota Sukabumi
Tahun 2019-2023

Persentase Pertumbuhan per Kapita (%)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,42	-6,80	2,24	3,79	3,60
Jumlah Penduduk (ribu orang)	326,61	345,20	350,15	355,42	360,64
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,10	5,69	1,44	0,50	0,49

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

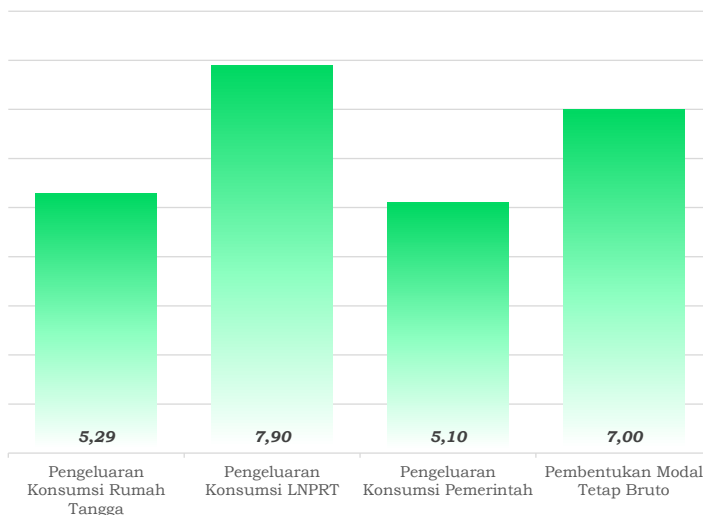
2.1.1.3. PDRB Menurut Pengeluaran

2.1.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

Tahun 2023 Kota Sukabumi tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. Pada sisi pengeluaran, Konsumsi LNRT (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,90 persen, kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,00 persen. Konsumsi rumah tangga 5,29 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 5,10 persen. Sementara pertumbuhan komponen inventori dan komponen ekspor neto laju pertumbuhannya tidak ditampilkan.

Struktur PDRB pengeluaran Kota Sukabumi tahun 2013 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yang menyumbang 81,49 persen terhadap PDRB tahun 2013, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 16,02 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 10,60 persen dan komponen Konsumsi LNPR (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 4,56 persen. Sementara itu komponen ekspor neto dan Perubahan inventory yang bernilai negatif, merupakan komponen pengurang dalam PDRB, masing-masing memiliki kontribusi sebesar 12,66 persen dan 0,02 persen.

Gambar 2.1
Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Pengeluaran
Tahun 2023 (Persen)



Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2023 Berita Resmi Statistik, 2024

Pola perekonomian tampak mulai pulih dengan ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang kembali positif karena ditunjang oleh kinerja positif dari seluruh komponen. Perekonomian membaik di tahun 2022 dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan diwarnai oleh peranan komponen LNPRT yang dominan. Pada tahun 2023 komponen LNPRT masih mendominasi laju pertumbuhan dari sisi pengeluaran, walau kecepatan pertumbuhan PDRB mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Masa tahun politik di 2022-2023 ditandai dengan pertumbuhan di komponen LNPRT yang cukup menonjol.

Tabel 2.5
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB ADHB			PDRB ADHK 2010		
	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	447,76	491,17	547,17	277,05	286,97	307,55
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	638,06	704,40	752,55	459,55	481,63	503,98
Pengadaan Listrik dan Gas	27,52	29,53	30,77	16,99	18,00	18,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,00	19,25	19,83	11,73	12,47	12,73
Konstruksi	892,12	943,84	1.041,62	601,49	600,60	641,76
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.941,55	5.410,49	5.769,43	3.572,48	3.767,92	3.911,06
Transportasi dan Pergudangan	1.391,72	1.541,49	1.763,39	777,52	836,52	912,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	385,49	436,87	483,20	247,78	271,81	293,05
Informasi dan Komunikasi	559,42	588,91	625,56	534,52	571,97	607,26
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.522,26	1.624,98	1.720,80	934,62	958,67	990,62
Real Estat	153,33	169,07	180,11	116,52	123,86	130,72
Jasa Perusahaan	228,98	255,45	279,41	145,66	158,96	171,74
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	583,17	580,24	600,15	329,20	328,20	334,99

Lapangan Usaha	PDRB ADHB			PDRB ADHK 2010		
	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jasa Pendidikan	585,18	640,08	695,88	344,12	371,97	393,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	256,39	283,83	308,44	181,55	199,43	210,84
Jasa lainnya	405,09	472,64	531,37	300,15	335,16	360,99
Produk Domestik Regional Bruto	12.401,54	13.053,04	15.349,71	8.534,72	8.851,05	9.801,88

Keterangan: ¹⁾ Angka Sementara ²⁾ Angka Sangat Sementara

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2023 Berita Resmi Statistik, 2024

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ADHK 2010			Distribusi PDRB ADHB		
	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,76	3,58	7,17	3,43	3,46	3,56
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	2,49	4,81	4,64	5,04	4,96	4,90
Pengadaan Listrik dan Gas	8,98	5,90	3,19	0,21	0,21	0,20
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,02	6,32	2,09	0,14	0,14	0,13
Konstruksi	4,00	-0,15	6,85	6,83	6,65	6,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,64	5,47	3,80	37,86	38,12	37,59
Transportasi dan Pergudangan	3,41	7,59	9,08	10,66	10,86	11,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,74	9,70	7,81	2,95	3,08	3,15
Informasi dan Komunikasi	8,23	7,01	6,17	4,26	4,15	4,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.522,26	1.624,98	1.720,80	934,62	958,67	990,62
Real Estat	7,76	6,30	5,54	1,17	1,19	1,17
Jasa Perusahaan	7,87	9,73	8,04	1,75	1,80	1,82

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ADHK 2010			Distribusi PDRB ADHB		
	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Soaial Wajib	-2,76	-0,34	2,07	4,47	4,09	3,91
Jasa Pendidikan	2,88	8,09	5,79	4,48	4,51	4,53
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,82	9,85	5,72	1,96	2,00	2,01
Jasa lainnya	1,42	11,67	7,71	3,10	3,33	3,46
Produk Domestik Regional Bruto	-1,49	3,71	5,12	100,00	100,00	100,00

Keterangan: ¹⁾ Angka Sementara ²⁾ Angka Sangat Sementara

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2023 Berita Resmi Statistik, 2024

Tabel 2.7
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023²⁾ (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,17	0,22
Pertambangan dan Penggalan	-	-
Industri Pengolahan	4,64	0,24
Pengadaan Listrik dan Gas	3,19	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,09	0,00
Konstruksi	6,85	0,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,80	1,54
Transportasi dan Pergudangan	9,08	0,81
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,81	0,23
Informasi dan Komunikasi	6,17	0,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.522,26	1.624,98
Real Estat	5,54	0,07
Jasa Perusahaan	8,04	0,14

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,07	0,07
Jasa Pendidikan	5,79	0,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,72	0,12
Jasa lainnya	7,71	0,28
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,12	5,12

Keterangan: ²⁾ Angka Sangat Sementara

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2023 Berita Resmi Statistik, 2024

Tabel 2.8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB ADHB			PDRB ADHK 2010		
	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi Rumah Tangga	10.421,22	11.406,85	12.508,19	6.661,37	7.022,52	7.393,92
Konsumsi LNPR	568,41	626,53	700,43	376,61	402,50	434,30
Konsumsi Pemerintah	1488,69	1.506,40	1.626,88	898,70	888,30	933,63
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.122,79	2.218,41	2.459,36	1.391,21	1.396,15	1.493,84
Perubahan Inventori	-110,39	-6,37	-2,46	-69,15	-3,98	-1,49
Ekspor Neto	-1.437,66	-1.559,58	-1.942,70	-407,68	-381,33	-452,32
Produk Domestik Regional Bruto	13.053,04	14.192,25	15.349,71	8.851,05	9.324,16	9.801,88

Keterangan: ¹⁾ Angka Sementara ²⁾ Angka Sangat Sementara

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2023 Berita Resmi Statistik, 2024

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran
Tahun 2021-2023 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ADHK 2010			Distribusi PDRB ADHB		
	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi Rumah Tangga	3,63	5,42	5,29	79,84	80,37	81,49
Konsumsi LNPR	1,88	6,87	7,90	4,35	4,41	4,56

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ADHK 2010			Distribusi PDRB ADHB		
	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi Pemerintah	1,42	-1,16	5,10	11,40	10,61	10,60
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,45	0,36	7,00	16,26	15,63	15,62
Perubahan Inventori				-0,85	-0,04	-0,02
Ekspor Neto				-11,01	-10,99	-12,66
Produk Domestik Regional Bruto	-1,49	3,71	5,12	100,00	100,00	100,00

Keterangan: ¹⁾ Angka Sementara ²⁾ Angka Sangat Sementara

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2023 Berita Resmi Statistik, 2024

Tabel 2.10
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2023²⁾ (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
Konsumsi Rumah Tangga	5,29	3,98
Konsumsi LNPR	7,90	0,34
Konsumsi Pemerintah	5,10	0,49
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,00	1,05
Perubahan Inventori		0,03
Ekspor Neto		-0,76
Produk Domestik Regional Bruto	5,12	5,12

Keterangan: ²⁾ Angka Sangat Sementara

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2023 Berita Resmi Statistik, 2024

Tabel 2.11
PDRB Per Kapita Kota Sukabumi Tahun 2021-2023

PDRB Per Kapita	2021 ³⁾	2022 ¹⁾	2023 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(3)
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	37,28	39,93	42,56
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	25,28	26,23	27,18
Persentase Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	2,24	3,79	3,60

Keterangan: ³⁾ Angka Revisi ¹⁾ Angka Sementara ²⁾ Angka Sangat Sementara

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2023 Berita Resmi Statistik, 2024

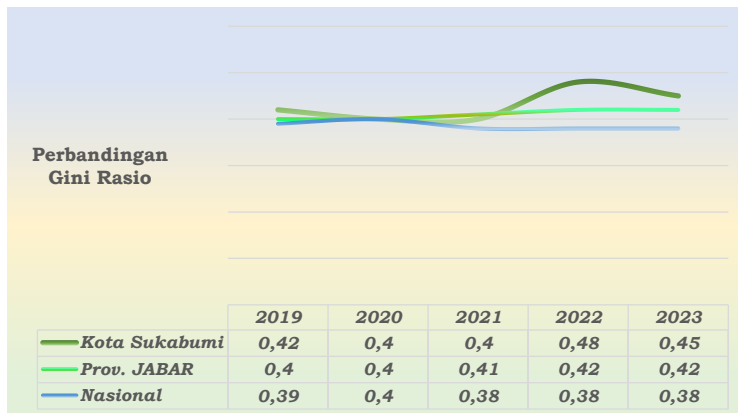
2.1.1.4. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) merupakan masalah perbedaan pendapatan antara golongan masyarakat atau daerah maju dengan daerah tertinggal. Semakin besar ketimpangan pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Indikator gini ratio merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan alam suatu populasi. Semakin tinggi indeks gini, semakin tinggi ketimpangan. Indeks gini berkisar antara 0 (sama sekali tidak ada ketimpangan) hingga 1 (ketimpangan maksimal). Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Angka Indeks Gini selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi. Pada Tahun 2023 tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,45 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Berikut disajikan perbandingan indeks gini Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama periode 2019-2023:

Gambar 2.2
Realisasi Indeks Gini di Kota Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Sukabumi yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,45. Angka ini menurun 0,03 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada tahun 2022. Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Berdasarkan klasifikasi atau kategori ketimpangan menurut Michael Tadaro, Kota Sukabumi termasuk wilayah dengan tingkat ketimpangan kategori sedang (angka gini ratio berkisar 0.36-0,49). Kota Sukabumi termasuk wilayah yang memiliki karakteristik perekonomian berbasis industri dan perdagangan. Hal ini menyebabkan level pendapatan yang berbeda yang diterima oleh penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga yang menyebabkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

Tingginya ketimpangan pendapatan merupakan ancaman serius, tidak hanya berupa turunnya kesejahteraan sekelompok masyarakat, namun juga mendistorsi pertumbuhan ekonomi akibat hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia menyatakan 4 (empat) faktor penyebab utama ketimpangan pendapatan, yaitu (1) Ketimpangan peluang yang tercermin pada nasib anak-anak dari keluarga miskin, yang terpengaruh oleh tempat mereka dilahirkan atau pendidikan orang tua mereka; (2) Ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, sementara tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini menyebabkan mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang kecil; (3) Konsentrasi kekayaan, dimana kaum elit memiliki asset keuangan seperti properti dan saham; dan (4) Ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Hal ini terlihat saat terjadi guncangan, dimana masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak karena

menurunnya kemampuan untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

2.1.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tingkat kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan manusia terindikasikan oleh beberapa indikator kinerja, yang paling banyak dipakai adalah penggunaan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM atau disebut juga *Human Development Index* atau *HDI* yang diperkenalkan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Penyempurnaan metode penghitungan IPM oleh UNDP dilakukan secara berkala untuk memperoleh indikator yang lebih baik lagi dan relevan dalam mengukur pembangunan manusia. Perhitungan IPM ini mengacu kepada perhitungan BPS yang mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010. Pada tahun 2023 Hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF) digunakan sebagai dasar penghitungan Umur Harapan Hidup (UHH).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM antar waktu akan menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun melambat dibanding dua tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi tahun 2023 mencapai 77,16 poin meningkat sebesar 0,92 poin (1,21 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 76,24. Selama periode 2020-2023, IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun.

Peningkatan IPM Kota Sukabumi tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,89 tahun, lebih lama 0,25 tahun (0,33 persen) dibandingkan tahun 2022.

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun (0,07 persen) dibandingkan tahun 2022 dari 13,59 tahun menjadi 13,60 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,23 tahun (2,27 persen) dibandingkan tahun 2022 dari 10,14 tahun menjadi 10,37 tahun.

Dimensi standar hidup layak diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2023 mengalami peningkatan 570 ribu rupiah (5,08 persen) dibanding tahun 2022 menjadi sebesar Rp 11,80 juta rupiah.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2013, status pembangunan manusia Kota Sukabumi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2020–2023 IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 75,06 pada tahun 2020 menjadi 77,16 pada tahun 2023. IPM Kota Sukabumi berada di atas IPM Jawa Barat sepanjang periode 2020–2023. Peningkatan IPM tahun 2023 IPM didukung oleh semua dimensi penyusunnya, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak. Indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami akselerasi pertumbuhan di 2023 sebesar 5,08 persen. Sedangkan dua indikator yang mengalami perlambatan pertumbuhan di 2023 dibanding tahun sebelumnya adalah Umur Harapan Hidup (UHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan masing-masing 0,33 persen dan 2,27 persen. Kecepatan pertumbuhan pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) bergerak stabil sama seperti di tahun 2022, yaitu 0,07 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi
Menurut Dimensi Penyusunnya
Tahun 2020-2023

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	74,23	74,38	74,64	74,89

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,47	13,58	13,59	13,60
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,59	9,81	10,14	10,37
Sumber Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	10.999	10.942	11.229	11.799
Indeks Pembangunan Manusia		75,06	75,44	76,24	77,16

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

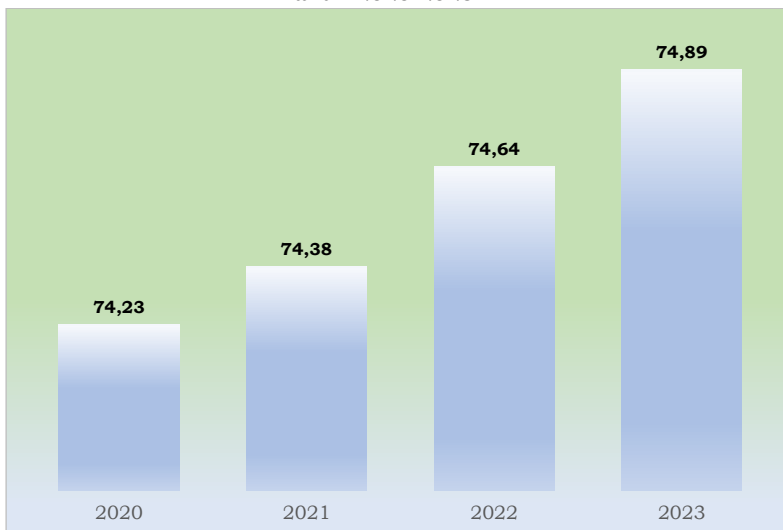
Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Peningkatan IPM Kota Sukabumi tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi standar hidup layak.

Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH Kota Sukabumi telah meningkat sebesar 0,66 tahun. Selama periode tersebut, rata-rata UHH Kota Sukabumi tumbuh sebesar 0,30 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kota Sukabumi adalah 74,23 tahun, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 74,89 tahun. UHH tahun 2023 meningkat sebesar 0,25 tahun (0,33 persen) jika dibandingkan tahun 2022. Terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan di 2023 dibanding tahun 2022 yang mencapai 0,35 persen. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Penambahan umur harapan hidup dari bayi yang baru lahir merupakan dampak positif dari keberhasilan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik dari sisi prasarana,

akses, hingga kualitas kesehatan. Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3
Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, program pembangunan manusia perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya agar lebih terarah.

Selama periode 2020 hingga 2023, rata-rata pertumbuhan HLS Kota Sukabumi sebesar 0,32 persen per tahun. Pada 2023, HLS Kota Sukabumi mencapai 13,60 tahun, yang berarti anak umur 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma II. Sementara untuk rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,23 tahun (2,27 persen) dibandingkan tahun 2022 dari 10,14 tahun menjadi 10,37 tahun. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.

Berikut gambaran Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020-2023:

Gambar 2.11
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kota Sukabumi, Tahun 2020-2023

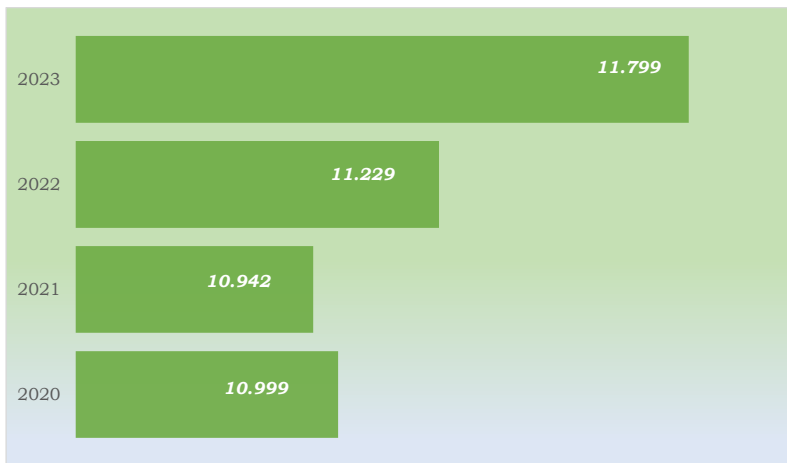


Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Sementara pada periode yang sama, RLS Kota Sukabumi rata-rata tumbuh sebesar 2,64 persen per tahun. Pada 2023, RLS Kota Sukabumi mencapai 10,37 tahun atau setara dengan menyelesaikan masa pendidikan hingga menamatkan SMA kelas X. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Sukabumi yang lebih baik. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator proses pembangunan dari program-program yang bersifat jangka pendek. Sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan hasil upaya pembangunan yang bersifat jangka panjang. Kedua indikator ini saling melengkapi dalam menggambarkan capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita per tahun (harga konstan 2012). Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita penduduk Kota Sukabumi mencapai Rp 11,80 juta per tahun. Angka ini meningkat Rp 570 ribu (5,08 persen) dibandingkan tahun 2022. Dalam kurun waktu 2020-2023, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat rata-rata sebesar 2,39 persen per tahun. Pengeluaran riil per kapita selama tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.4
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023 (Rp000)



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Jika dibandingkan terhadap IPM Provinsi Jawa Barat, IPM Kota Sukabumi berada diatas IPM Provinsi Jawa Barat yang artinya bahwa secara rata-rata kualitas pembangunan manusia di Kota Sukabumi melebihi rata-rata kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat.

Apabila sejak tahun 2013 status pembangunan manusia Kota Sukabumi telah tergolong berkategori “tinggi”, karena IPM nya telah berada di atas 70, maka status “tinggi” dalam pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat baru tercapai di tahun 2016. Kecepatan dalam melakukan pembangunan di setiap wilayah tidaklah merata. Upaya yang dikerahkan untuk mendorong kemajuan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan mempengaruhi kecepatan yang terjadi.

IPM di Kota Sukabumi maupun di Provinsi Jawa Barat senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang kurun waktu 2020-2023, IPM Kota Sukabumi telah mengalami kenaikan sebanyak 2,10 poin dengan rata-rata kecepatan pertumbuhan per tahun sebesar 0,92 persen. Sementara Provinsi Jawa Barat mengalami rata-rata pertumbuhan 0,74 persen per tahun dengan kenaikan IPM 1,63 poin

dalam periode yang sama. Kecepatan pertumbuhan IPM di Kota Sukabumi masih berada di atas rata-rata Jawa Barat.

Di wilayah Provinsi Jawa Barat terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM di kategori “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$), serta dua puluh kabupaten/kota dengan capaian IPM berkategori “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan tiga kabupaten/kota dengan capaian IPM di kategori “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$). Sejak tahun 2012 Provinsi Jawa Barat tidak memiliki wilayah kabupaten/kota dengan capaian pembangunan manusia berkategori “rendah”.

2.1.1.6. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan sering sekali menjadi penghambat laju pembangunan manusia, misalnya penduduk miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga berpengaruh buruk bagi hidupnya. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan perlu aksi yang mencakup berbagai dimensi yang berkaitan.

Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibanding kondisi 2022 dari 8,02 persen menjadi 7,50 persen. Berikut tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi tahun 2020-2023:

Tabel 2.13
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2020	25,42	7,70
2021	27,19	8,25
2022	26,59	8,02
2023	24,96	7,50

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Untuk mengukur kemiskinan, konsep yang digunakan BPS yaitu dengan mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang

terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berikut tabel dalam kurun waktu empat tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Kota Sukabumi sebesar 1,39 persen pada tahun 2021, dan terendah sebesar 1,17 persen di tahun 2020, dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 1,39 persen. Penurunan angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 2.14
Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	25,42	27,19	26,59	24,96
Persentase Penduduk Miskin	7,70	8,25	8,02	7,50
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	547.415	567.734	594.118	644.276
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,17	1,39	1,27	1,21
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,22	0,36	0,38	0,31

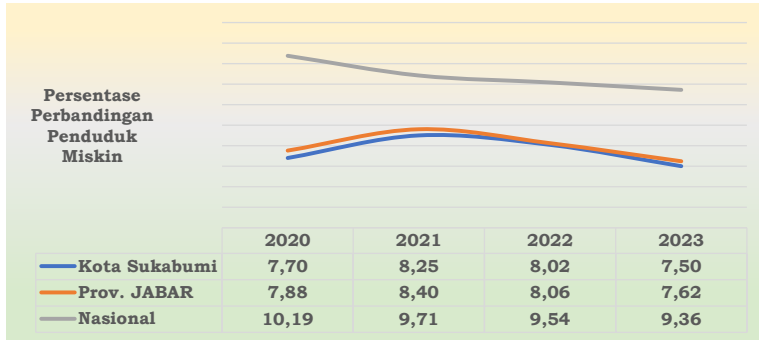
Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 0,38 persen di tahun 2022, dan terendah sebesar 0,22 persen di tahun 2020. Kondisi keparahan kemiskinan di Kota Sukabumi sebesar 0,38 persen pada tahun 2022 yang berarti naik

dari tahun sebelumnya, memiliki makna bahwa sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sukabumi meningkat.

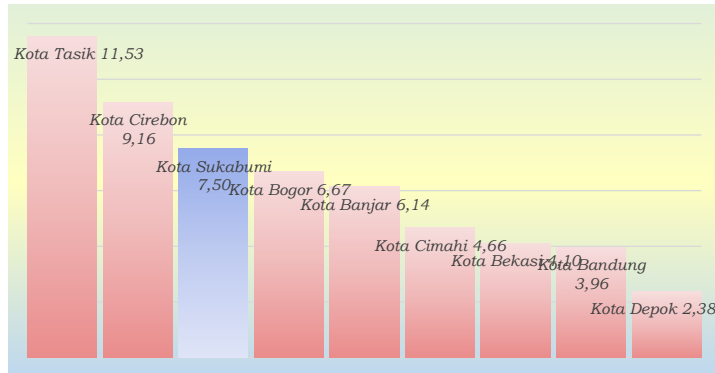
Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional, capaian persentase penduduk miskin Kota Sukabumi berada dibawahnya. Tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 2.5
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Gambar 2.6
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi dengan
Kota Lainnya di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

2.1.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke

dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja.

Selalu lebih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Sukabumi dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional ini menandakan bahwa perbandingan antara laju pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja di Kota Sukabumi masih relatif besar, sehingga angkatan kerja yang tersedia yang tidak terserap pasar kerja lebih besar.

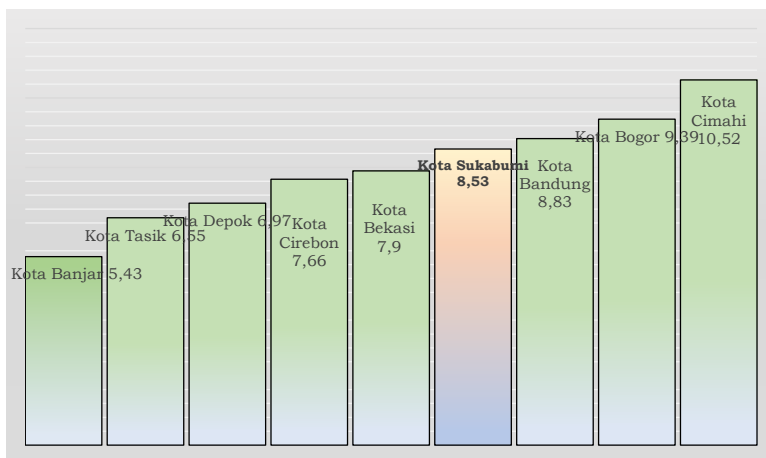
Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Permasalahan ketenagakerjaan dirasa sangat kompleks dengan kondisi Kota Sukabumi yang tidak memiliki sumber daya alam dan angkatan kerja semakin meningkat. Selama periode 2020-2023, kondisi TPT Kota Sukabumi turun sebesar 3,64 persen. Berikut tabel perbandingan persentase TPT Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2020-2023:

Gambar 2.7
Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2023



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Gambar 2.8
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi
dengan Kota Lain di Jawa Barat Tahun 2023 (Persen)



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

TPT Kota Sukabumi Tahun 2023 dibandingkan dengan Kota lain, berada pada urutan ke-4 (empat) tertinggi di Jawa Barat. Begitupun dibandingkan dengan Jawa Barat dan Nasional, TPT Kota Sukabumi lebih tinggi. Permasalahan terkait pengangguran dan dunia kerja ini diantaranya yaitu jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja dan juga belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja. Berikut tabel penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin:

Tabel 2.15
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kota Sukabumi Tahun 2023

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	27.669	17.222	44.891
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	5.946	3.916	9.862
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	7.882	2.013	9.895
Buruh/Karyawan/Pegawai	48.733	23.731	72.464

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pekerja bebas	9.392	1.794	11.186
Pekerja keluarga/tak dibayar	1.706	6.758	8.464
Jumlah	101.328	55.434	156.762

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

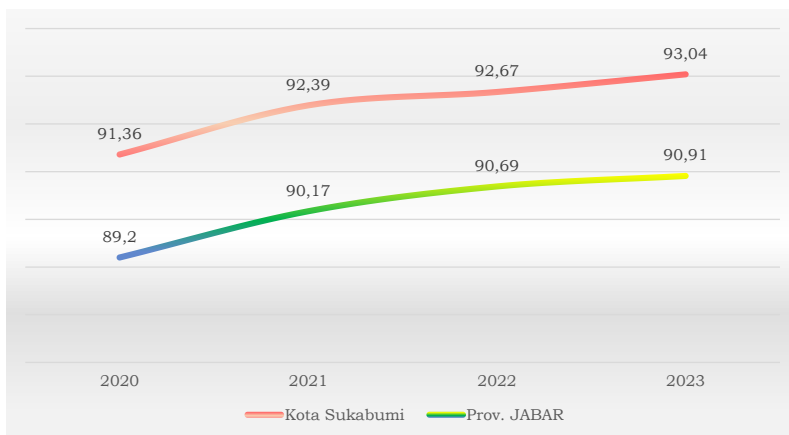
2.1.1.8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Untuk mengetahui capaian pembangunan manusia secara gender digunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan membandingkan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Capaian IPG Kota Sukabumi lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPG Provinsi Jawa Barat. Artinya pembangunan manusia secara gender di Kota Sukabumi lebih merata dibanding di tingkat Jawa Barat. Berikut grafik perbandingan capaian IPG Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat:

Gambar 2.17
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sukabumi
dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024

2.1.2. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran aspek pelayanan umum Kota Sukabumi menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan di Kota Sukabumi mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sementara untuk Tahun 2019 yang dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.1.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Berikut disampaikan hasil capaian Perangkat Daerah berdasarkan urusan sampai dengan Tahun 2023. Untuk capaian sampai dengan Semester I Tahun 2024, belum tersedia mengingat data masih dalam proses perhitungan.

2.1.2.1.1 Pendidikan

Tabel 2.17

**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2023
Tahun 2020-2023**

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	80,7	70,17	80,9	81,21
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	101,83	98,3	99,76	98,87
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	108,34	92,79	98,18	92,15
4	Tingkat partisipasi warga negara usia <18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian indikator urusan pendidikan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dasar sembilan tahun, meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, dan meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 37.773. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 38.201.

2. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 17.162. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 18.622.
3. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 1.890. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan = 1.890.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	98,28%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	92,53%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 –6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100%	80,32%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Tahun 2023.

Capaian SPM Pendidikan di Kota Sukabumi untuk jenis layanan dasar pada jenjang Pendidikan Dasar adalah 98,28%, jenjang kesetaraan capaiannya adalah 92,53% dan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah 80,32%, untuk PAUD capaiannya belum optimal dikarenakan

pada jenjang ini belum masuk dalam kategori Program Wajib Belajar, namun demikian capaiannya sudah dapat dikategorikan “Baik”.

2.1.2.1.2 Kesehatan

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Angka	0,4	0,45	0,4	3,23
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	101,91	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	103,83	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	108,69	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	73,97	99,15	95,90	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	24,07	100	80,73	95,79
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	26,6	90,16	41,35	62,62
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	72,45	75	89,47	97,07

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	12,46	100	89,54	84,13
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	13,03	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	91,93	100	87,63	89,36
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	94,56	100	94,79	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator urusan Kesehatan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan, meningkatkan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan, dan menurunkan angka kematian.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 1.094. Jumlah Penduduk di Kota Sukabumi = 316.581;
2. Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 6. Jumlah RS di Kota Sukabumi = 6;

3. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 5.785. Jumlah ibu hamil di Kota Sukabumi = 5.785;
4. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 5.522. Jumlah ibu bersalin di Kota Sukabumi = 5.522;
5. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5.401. Jumlah bayi baru lahir di Kota Sukabumi = 5.295;
6. Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 25.415. Jumlah balita di Kota Sukabumi = 25.406;
7. Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 51.734. Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Sukabumi = 54.006;
8. Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 147.013. Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kota Sukabumi = 216.852;
9. Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 37.128. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kota Sukabumi = 40.536;
10. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 27.134. Jumlah penderita hipertensi di Kota Sukabumi = 32.251;
11. Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 5.004. Jumlah penderita DM di Kota Sukabumi = 4.865;
12. Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 445. Jumlah penderita ODGJ di Kota Sukabumi = 498;
13. Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 10770. Jumlah penderita TBC di Kota Sukabumi = 6.016;
14. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 12.839. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota Sukabumi = 10.824;

Capaian indikator kinerja di atas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96,62%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	72,04%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,27%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87,31%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	91,49%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Tahun 2023.

Capaian SPM Urusan Kesehatan di Kota Sukabumi untuk jenis layanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah 93,27% dikarenakan Kondisi kemampuan sumber dana APBD sangat terbatas untuk ketersediaan BMHP (Belanja Medis Habis Pakai) untuk belanja stik kolesterol yang dibutuhkan untuk pemeriksaan belum semuanya terpenuhi. Kurangnya kesadaran orang usia 15-59 yang mendapatkan skrining kesehatan standar hanya tercapai kinerja 41,35%. Penyebaran Pos Binaan Terpadu (Posbindu) belum merata disetiap Rukun Warga (RW) yang ada di wilayah Kota Sukabumi, sehingga masih cukup banyak kelompok lansia yang tidak tersentuh dalam skrining kesehatan. Selain itu, belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan tentang pelayanan lansia yang menggunakan akses pelayanan di rumah sakit atau klinik swasta.

2.1.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.21
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	478,95	-	57,32	18,45
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	165,25	57,57	55,41	64,15
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	94,39	100
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	71,54	91,2	91,51	71,64
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	3,43	100	100	100
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	84,81	81,08	87,63	86,86
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	5,36	100	100	28,07
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	-	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu terwujudnya

infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan, terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan, dan terwujudnya kawasan permukiman yang layak dan Meningkatnya disiplin, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan sarana dan prasarana jalan, mengembangkan penataan ruang wilayah, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, meningkatkan penataan kawasan kumuh, meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana (KRB), dan Meningkatkan kesiagaan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran, Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran Perda, meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, dan meningkatkan pendidikan politik yang berkualitas.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Sukabumi (ha) = 4,91 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota Sukabumi (ha) = 26,61;
2. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Sukabumi (m) = 1. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota Sukabumi (m) = 0. Kota Sukabumi secara geografis tidak memiliki wilayah pantai, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peta RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042;
3. Luas irigasi kewenangan Kota Sukabumi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 841,40 Ha. luas daerah irigasi kewenangan Kota Sukabumi = 1.311,51 Ha;
4. Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kota Sukabumi = 119.296. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Sukabumi = 119.296;

5. Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 67.536. Jumlah rumah di Kota Sukabumi = 94.270;
6. Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 202. Jumlah IMB yang berlaku = 202;
7. Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 102,326. Jumlah total panjang jalan Kota Sukabumi = 117,796;
8. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota Sukabumi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 48. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota Sukabumi = 171. Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 293. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 293.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-sehari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, Tahun 2023.

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Sukabumi untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik adalah 100%, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Sementara pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal atau IPAL Kawasan Pembangunan IPAL membutuhkan dana yang cukup besar dan lahan dengan luas tertentu yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	24,49	100	100	100
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	12,87	89,3	0,15	25,25
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	3,01	1,87	1,41	1,39
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen	0	100	0	35,01

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian indikator urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya tetap diprioritaskan kegiatan yang mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu terwujudnya terwujudnya kawasan permukiman yang layak. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, meningkatkan penataan kawasan

kumuh, meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun $n = 30$ Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun $n = 30$;
2. Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1;
3. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 38,65. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 153,03;
4. Jumlah unit rumah tidak layak huni = 1.317. Jumlah total unit rumah Kota Sukabumi = 94.270;
5. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 4.193. Jumlah unit rumah Kota Sukabumi = 11.976.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat di Kota Sukabumi sebagai berikut:

Tabel 2.24
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, Tahun 2023.

Capaian SPM Perumahan Rakyat di Kota Sukabumi untuk jenis pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 100 persen dikarenakan terdapat kebijakan refocusing anggaran.

2.1.2.1.4 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perindungan Masyarakat Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	2,92
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	8,5	8,9	10,34

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya disiplin, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda, meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, dan meningkatkan pendidikan politik yang berkualitas.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pengaduan yang ditangani = 34. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 34;
2. Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 7
Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 7;
3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 353.631;
4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana: 358.854;
5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 1.092. Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan = 1.092;
6. Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Sukabumi dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota Sukabumi = 98. Jumlah kejadian kebakaran di Kota Sukabumi = 98;
7. Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 10,34 menit.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, Tahun 2023.

2.1.2.1.5 Sosial

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator Urusan Sosial di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, Meningkatkan pelayanan dasar dan penghidupan penduduk miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 160. Populasi korban bencana alam dan sosial di Kota Sukabumi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kota Sukabumi = 160;
2. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 8. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi = 8.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi, Tahun 2023

2.1.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan

2.1.2.2.1. Tenaga Kerja

Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	Persen	100	1,91	27,88	8,85
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	100	100	100	91.711.23
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	40,33	29,33	25,61	47,24
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	41,16	41,1	48,54	59,32

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator urusan Urusan tenaga kerja di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi menyusun kebijakan terkait tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan optimalisasi program peningkatan kesempatan kerja.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 8. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi = 8;
2. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 3.139. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 11.256;
3. PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 9.801,88 Jumlah tenaga kerja = 11.256;
4. Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 259. Jumlah Perusahaan = 1.011;
5. Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan = 1.908. Jumlah pencari kerja yang terdaftar = 3.930.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	63,92	77,369	77,56	58,55
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,04	0,036	0,32	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,01	11,464	0,011	25,69

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan anak. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Meningkatkan penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah ARG pada belanja langsung APBD = 423.993.145.166.
Jumlah seluruh belanja langsung APBD = 546.666.993.557;
2. Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kota Sukabumi yang didampingi = 70. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 100.595;
3. Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 33. Jumlah penduduk perempuan = 123.354;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.3. Pangan

Tabel 2.31
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	116,59	133,081	138	116,9

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator Urusan Pangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA), dan Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi memiliki cadangan pangan yang cukup yaitu sebanyak = 42.721,47 dari jumlah kebutuhan pangan = 36.545,76.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.4. Pertanian

Tabel 2.32
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	26,55	N/A	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	0	N/A	N/A	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	26,65	N/A	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator urusan Urusan Pertanian di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 belum terealisasi dengan baik, dan belum mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD. Hal ini disebabkan belum adanya perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menerbitkan ijin lokasi pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya.

2.1.2.2.5. Lingkungan Hidup

Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	59,58	60,3	59,71	60,0
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	88,63	85,94	73,76	72,54

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	0	0	0,03	0

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pengendalian pencemaran tanah, air, dan udara, Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan, Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan, Meningkatkan kerjasama pengelolaan persampahan, Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sukabumi 60;
2. Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 49.275. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan Kota Sukabumi = 67.308,3;
3. Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota Sukabumi = 1. Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 28.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	98,19	99,45	99,11	99,43
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	28,44	49,75	45,09	61,25
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	97,69	98,02	98,83	99,35
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	100	100	41,93

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP), dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman = 259.210. Jumlah penduduk wajib KTP-el = 260.985;
2. Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 61.638. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 100.595;
3. Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 107.318. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 107.937;
4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 13. Jumlah OPD = 31.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,21	0	2,03	2,12
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67,8	75,52	74,64	69,99
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	-	8,11	9,33	10,89

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyusun kebijakan terkait pengendalian pertumbuhan penduduk, Optimalisasi program keluarga berencana, reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. TFR (Angka Kelahiran Total) 2,16;
2. Jumlah peserta KB Aktif Modern = 35.713. Jumlas Pasangan Usia Subur = 51.029;
3. Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 5.562. Jumlah Pasangan Usia Subur = 51.029.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.8. Perhubungan

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Angka	80,8	100	1	1
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Angka	0,48 (arteri sekunder) 0,32 (kolektor sekunder) 0,23 (local sekunder)	0,38	0,37	0,33

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kota Sukabumi Tahun 2023 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan sarana dan prasarana jalan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Rasio konektivitas Kota Sukabumi 1;
2. Kinerja lalu lintas Kota Sukabumi 0,33.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.9. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	71,87	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	V/C Ratio di J alan Kabupaten/Kota	Persen	100	75,76	75,76	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	75,27	76,93	76,93	68,26

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 31. Jumlah OPD = 31;
2. Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 80. Jumlah Layanan Publik = 100;
3. Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kota Sukabumi = 280.048. Jumlah penduduk = 358.854;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	13,16	14,83	18,98	21,7
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 67. Jumlah seluruh koperasi = 353;
2. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirasausaha = 31.926. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 31.926;
3. (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di Kota Sukabumi = 3.322.374.968.365. Jumlah investasi tahun n-1 di Kota Sukabumi = 3.411.037.717.214.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.11. Penanaman Modal

Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	50,05	451,16	-2,60	-54,51

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi kurang baik dan tidak mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Menurunnya kualitas iklim usaha dan investasi.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa investasi di Kota Sukabumi mengalami penurunan dengan jumlah investasi tahun 2023 - jumlah investasi tahun 2021 di Kota Sukabumi = 1.551.576.344.548 - 3.411.037.717.214 = -1.859.461.372.666.

Capaian indikator kinerja diatas tidak selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	17,6	25,59	24,41	25,4
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	22,6	23,87	22,78	23,17
3	Peningkatan prestasi olahraga	Jenis	9	15	17	36

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi cukup baik karena adanya pandemi Covid-19, namun tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga, dan prestasi olah raga Daerah, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota Sukabumi = 22.745. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Sukabumi = 89.529;
2. Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Sukabumi = 20.747 jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Sukabumi = 89.529;
3. Peningkatan prestasi olahraga dengan perolehan 36 medali.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.13. Kebudayaan

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	73	73,33	73,3	83,56

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Kebudayaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa kinerja Kota Sukabumi mampu melestarikan cagar budaya sejumlah = 21, dari jumlah cagar budaya yang terdata = 106.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.14. Statistik

Tabel 2.42
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	71,87	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	78,12	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Statistik di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 31. jumlah OPD = 31;
2. Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 31. jumlah OPD = 31;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.15. Persandian

Tabel 2.43
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0	62,95	63,41	70,69

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Persandian di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 belum terealisasi dengan baik, namun tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, mengelola 25 sistem elektronik yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik, dan mengamankan 25 titik system komunikasi. Adapun jumlah nilai per area keamanan informasi = 409 dengan jumlah area penilaian = 645 Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.16. Perpustakaan

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	61,49	65,34	70,10	70,47
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	55,06	39,68	96,85	82,15

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Perpustakaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, dan Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, memiliki 90.605 koleksi buku yang tersebar di berbagai perpustakaan, dikunjungi oleh 361.581 orang baik secara online maupun onsite, memiliki 280 tenaga perpustakaan, mengelola 43 perpustakaan berstandar nasional, melaksanakan 6 kegiatan sosialisasi gemar membaca.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.17. Kearsipan

Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	55,03	56,03	63,12	64,61
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	50	51,67	66,67	71,67

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Kearsipan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi cukup baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP), dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, memiliki 99.200 arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, 112.000 arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, 2.500 arsip statis, dan 2.500 arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.3. Layanan Urusan Pilihan

2.1.2.3.1. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah (Ton)	1.243,83	1.388,70	1.401,11	102,89

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA).

2.1.2.3.2. Pariwisata

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Sat	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	7	1,99	2,24	7,78

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Sat	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	27	21,74	21,97	23,01
3	Tingkat hunian akomodasi	Hari	4.475	36.000	887	102,06
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,92	2,95	2,95	3,14
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp	13.419.712.356	46.861.100.000	22.448.213.698	24.610.383.299

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Pariwisata di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi cukup baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan ekonomi kreatif, Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mengembangkan disain Daerah sebagai objek wisata *heritage*.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah membina pengelolaan 5 destinasi wisata, melengkapi infrastruktur dasar untuk 7 destinasi wisata, dan mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2023 – Jumlah wisatawan tahun 2022 = 280. Jumlah wisatawan tahun 2022 = 3.599;
2. Jumlah wisatawan nusantara tahun 2023 – Jumlah wisatawan tahun 2022 = 101.531. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 441.132;
3. Jumlah kamar yang terjual = 410.179. Jumlah kamar yang tersedia = 401.865;
4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah 6,038%.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.3.3. Pertanian

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(Ton)	2,44	6,64	6,90	6,68
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	26,87	0	0	-100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian indikator Urusan Pertanian di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi cukup baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA), dan Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 22.314.
Luas panen = 3.337,51.;
2. Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2023 - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2022 = 0. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2022 = 1.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.3.4. Perdagangan

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	6,19	100	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	91,95	53,78	45,15	67,0
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	23,6	89,33	208,75	80,89

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Perdagangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 33.
Jumlah pelaku usaha di wilayah Kota Sukabumi = 33;
2. Realisasi = 1.019,36 Alokasi =1.350;
3. Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 728. Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kota Sukabumi = 900 UTTP.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.3.5. Perindustrian

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	3,88	0,42	3,19	2,21
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	10	0	10	95
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	16,27	0	100	0
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	0	100	0
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	85	85	85	0

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Perindustrian di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2023 – Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022 = 60. Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022 = 2720;
2. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan

2.1.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.2.4.1 Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan dan Keuangan
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	18,19	N/A	...	28,16
2	Rasio PAD	Persen	29,77	2,78	...	35,95
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	2	3	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	1	82,4	86,18	85,71
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian IKK urusan Urusan Perencanaan dan Keuangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Meningkatkan pengelolaan

keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah PAD = 388.308.928.238.
2. Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 85,71% Jumlah belanja APBD = 1.317.677.789.486

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.4.2 Pengadaan

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengadaan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	19,6	6,55	3,3	45,38
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	74,1	96,51	62,74	52,25

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Pengadaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Meningkatkan pengordinasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023 = 0. Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023 = 0;
2. Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 511. Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif = 609;
3. Jumlah nilai belanja langsung (Belanja Operasional) yang melalui pengadaan = 664.121.761.649. Total belanja langsung (Belanja Operasional) = 1.270.863.895.847;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.4.3 Kepegawaian

Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
			(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	210	283,76	76,06	75,75
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,6	9,86	7,8	15,77
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,09	84,75	37,6	50,81

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Kepegawaian di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan manajemen pegawai ASN dan meningkatkan pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan evaluasi dan pembinaan kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1.172. Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA ke bawah = 1.547;
2. Jumlah Pegawai PNS Fungsional (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) = 244. Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) = 1.547;
3. Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Kompetensi = 117. Seluruh Jumlah Pegawai Non Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) = 244.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.4.4 Manajemen Keuangan

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Manajemen Keuangan
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	1	2,8	3,87	10,38
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	1	14,71	0,31	16,66
3	Manajemen Aset	Persen	50	2	2	4
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	6,06	10,02	10,79	4,11

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Manajemen Keuangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi = 1.251.744.741.073.
Total belanja APBD dikurangi satu = 1.205.069.299.476;
2. Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi = 363.263.682.587.
Dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu = 362.135.926.773;
3. Nilai realisasi SiLPA = 120.840.911.331. Total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1.120.051.026.976.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.4.5 Transparansi dan Partisipasi Publik

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	110,96	0	0	96,30
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	83,33	41,67	41,67	83,33

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda. Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda;
2. Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 5. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Ekonomi

2.1.3.1.1. PDRB dan PDRB Per Kapita

Nilai PDRB mencerminkan kemampuan potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu daerah. Nilai PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 15.349,71 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.157,46 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 14.192,25 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 9.324,16 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 9.801,88 miliar rupiah pada tahun 2023. Di tahun 2023 Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen, dimana terjadi perlambatan kecepatan pertumbuhan ekonomi dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 5,35 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tanpa dipengaruhi inflasi.

Secara umum, PDRB per kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita, merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 37,93 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 42,56 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota Sukabumi juga mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga 2023, masing-masing sebesar 26,53 juta rupiah dan 27,18 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena pengaruh inflasi sudah tidak ada lagi disini.

Tabel 2.56
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kota Sukabumi, Tahun 2019-2023

Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
ADHB	12.387.691,54	12.401.540,58	13.053.044,18	14.192.254,06	15.349.709,36
ADHK	8.664.017,06	8.534.716,50	8.851.051,49	9.324.164,63	9.801.880,80

PDRB Per Kapita (Rupiah)					
Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
ADHB	37.927.735,70	35.925.772,04	37.278.009,63	39.931.275,25	42.561.942,04
ADHK	26.526.859,19	24.724.047,59	25.277.596,39	26.234.436,27	27.178.826,77

Persentase Pertumbuhan Per Kapita (%)					
Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,42	-6,80	2,24	3,79	3,60
Jumlah Penduduk (ribu orang)	326,61*)	345,20**)	350,15***)	355,42***)	360,64***)
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,10	5,69	1,44	0,50	0,49

* Angka sementara

* Angka sangat sementara

*) Berdasarkan hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015

***) Berdasarkan hasil SP LF 2020

***) Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Interim 2020-2023

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 BPS, 2024

2.1.3.2. Daya Saing SDM

2.1.3.2.1 Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen yang menyusun IPM. Indeks Pendidikan terdiri dari komponen indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah.

Indeks Pendidikan Kota Sukabumi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kenaikan ini berkorelasi dengan variabel pembentuknya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS Kota Sukabumi pada tahun 2022 sebesar 10,14. Artinya rata-rata masyarakat Kota Sukabumi pendidikan terakhirnya adalah setara dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Sementara itu, HLS Kota Sukabumi pada tahun 2022 mencapai 13,59 tahun, meningkat 0,01 poin dari angka HLS tahun 2021. Angka HLS sebesar 13,59 tahun menunjukkan bahwa harapan lama sekolah anak di Kota Sukabumi sudah masuk pada jenjang pendidikan tinggi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kinerja urusan pendidikan sudah semakin membaik.

Peningkatan akses dan mutu pendidikan menjadi kunci yang sangat penting untuk meningkatkan angka Indeks Pendidikan. Perlu dilakukan upaya antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar formal maupun non formal/kesetaraan, bantuan bagi siswa-siswi kurang mampu, dan pemberdayaan satuan pendidikan non formal berbasis kemasyarakatan. Jika hal tersebut dilakukan dengan tepat, maka Indeks Pendidikan Kota Sukabumi akan tetap berada di atas Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

2.1.3.2.2 Literasi/Numerasi

Literasi/numerasi adalah komponen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid sehingga mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Literasi merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksi dan berinteraksi dengan teks tulis agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya sehingga mampu beradaptasi sebagai masyarakat.

Rata-rata kemampuan literasi siswa Kota Sukabumi berdasarkan hasil asesmen nasional menunjukkan peningkatan dan termasuk dalam

kategori BAIK. Artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Numerasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Rapor Pendidikan Kota Sukabumi, rata-rata kemampuan numerasi siswa-siswi Kota Sukabumi berdasarkan hasil asesmen nasional menunjukkan tren meningkat dan masuk dalam kategori BAIK dan didapatkan data bahwa 40-70 persen peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi.

Seiring dengan meningkatnya literasi/numerasi peserta didik, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Sukabumi juga menunjukkan hasil yang semakin membaik. Berdasarkan penilaian IKK atau Indikator Kinerja Kunci yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, Kota Sukabumi merupakan terbaik ketiga tingkat nasional. Sementara untuk kinerja bidang kearsipan, merupakan terbaik keempat di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Namun demikian permasalahan pembangunan literasi masyarakat di Kota Sukabumi masih perlu menjadi perhatian terutama terkait dengan peningkatan budaya literasi masyarakat ditengah gempuran media sosial, sarana perpustakaan yang belum semuanya ideal, serta terbatasnya pustakawan.

2.1.3.3. Daya Saing Infrastruktur

2.1.3.3.1 Kualitas Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain untuk mengukur kepuasan masyarakat, IKLI dapat digunakan untuk mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

IKLI Kota Sukabumi termasuk ke dalam kategori B atau memiliki mutu pelayanan baik. Namun demikian, layanan infrastruktur tetap harus ditingkatkan. Jika dicermati lebih dalam, layanan infrastruktur yang sudah termasuk baik adalah infrastruktur listrik, jalur pedestrian, taman kota dan jaringan telekomunikasi. Sedangkan infrastruktur yang

perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya adalah layanan transportasi seperti terminal dan jaringan jalan skala desa, jaringan air bersih, dan jaringan air limbah.

2.1.3.3.2 Kemantapan Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar lalu lintas barang dan jasa, sehingga keadaan jalan dan jaringan-jaringan jalan dapat dijadikan acuan tentang tingginya kebudayaan dan kemajuan ekonomi suatu daerah.

Tingkat kemajuan jalan milik Kota Sukabumi saat ini tergolong cukup baik, dengan persentase mencapai sekitar 81 persen. Sekitar 154 ruas jalan Kota Sukabumi kondisinya tergolong cukup baik, sedangkan sisanya saat ini masih terus dalam perbaikan. Kondisi sarana jalan banyak dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor manusia, dalam hal ini kendaraan. Saat ini, upaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap jalan rusak terus dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

2.1.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Berdasar data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), hingga November 2022 sebanyak 4.488 usaha di Kota Sukabumi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya pengurusan perizinan yang dipermudah melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* berbasis risiko, jumlah ini perlu terus ditingkatkan. Untuk mendukung hal ini, berbagai inovasi kemudahan layanan terus diluncurkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Salah satunya melalui aplikasi Si Jimat Boss (Sistem Jemput Perizinan Masyarakat Bersama OSS). Sistem jemput bola perizinan langsung ke masyarakat ini sebetulnya sudah berjalan, hanya saja untuk OSS sedikit terkendala karena tidak bisa digabung dengan program yang lainnya.

Laju perkembangan investasi dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Sukabumi menunjukkan tren meningkat. Nilai investasi mencapai Rp. 3,322 triliun. Dari jumlah investasi tersebut, tenaga kerja yang terserap mencapai 25.353 orang dengan jumlah 6.237 perusahaan, terdiri dari mikro mencapai 5.996 perusahaan, Perusahaan Kecil (PK) sebanyak 234, Perusahaan Menengah (PM) mencapai 36, dan Perusahaan Besar (PB) sebanyak 21.

Dengan adanya investasi ini, tentunya berdampak kepada perekrutan tenaga kerja, yaitu sebanyak 25.353 orang.

2.1.3.5. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama atau IKU Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci atau IKK pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcomes atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran. Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4. Dalam Perda tersebut ditetapkan jumlah indikator sasaran atau indikator kinerja utama sebanyak 19 (sembilan belas), indikator kinerja tersebut terdiri dari 6 (enam) indikator untuk Misi I, 4 (empat) indikator untuk Misi II, 4 (empat) indikator untuk Misi III, dan 5 (lima) indikator untuk Misi IV.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah interpretasi atas penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, digunakan interpretasi pencapaian IKU sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian
I	Terciptanya Ekonomi Kota Sukabumi yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,12	5,37	N/A	N/A
a	Tercipta Ekonomi Kota Sukabumi yang Bertumpu Pada Sektor Perdagangan dan Jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	3,80	4,00	N/A	N/A
b	Berkembangnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	33,95	30,93	N/A	N/A
II	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,16	75,55	N/A	N/A
a	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	72,34	71,58	N/A	N/A
b	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Poin	0,34	0,33	N/A	N/A
c	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	27.496	34.001	N/A	N/A
III	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni/ Indeks Kenyamanan	Poin	23,82	65,00	N/A	N/A
a	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	87,36	86,00	N/A	N/A
b	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Poin	76,33	75,40	N/A	N/A
IV	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	74,78	73,00	N/A	N/A
a	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif	N/A	N/A

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2024.

Penetapan IKU yang dijabarkan dalam bentuk target setiap tahun akan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi.

Penentuan target IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 tetap memperhatikan capaian target IKU pada periode sebelumnya dan memperhatikan kecenderungan/tren di masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU tersebut. Karena itu, IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 terdiri dari 12 indikator.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2023

Pendekatan *Gap Analysis* (analisis kesenjangan) dan Analisis Deskriptif dapat digunakan sebagai metode evaluasi RKPD. *Gap Analysis* dipergunakan untuk membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Sementara Analisis Deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam Analisis Deskriptif, data-data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain untuk mempermudah memahami data dan penyampaian informasi sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Kedua metode diatas dipergunakan untuk menilai capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan yang akan datang. Adapun hasil evaluasi capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah tahun 2023 ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.59
Capaian Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	876.196.581.489	849.913.746.988	91,63	92,35	91,28	98,63
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	251.741.771.729	247.559.644.192	98,34	76,25	71,81	94,18
Dinas Kesehatan	497.451.676.739	476.830.750.414	95,85	100,00	98,57	98,57
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	103.357.095.235,00	102.632.300.139,00	80,76	85,10	84,30	99,06
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	12.007.840.038	11.516.923.465	91,61	100,00	100,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.584.587.590	3.569.431.271	99,23	100,00	99,96	99,96

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Sosial	8.053.610.158	7.804.697.507	94,84	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	128.132.119.714	126.208.888.473	98,35	87,56	86,82	99,81
Dinas Tenaga Kerja	3.881.256.980	3.712.725.276	91,24	83,75	83,75	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	7.843.982.235	7.583.539.916	90,13	87,14	87,14	100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	9.955.589.544	9.857.468.453	99,78	67,80	69,63	102,69
Dinas Lingkungan Hidup	31.202.248.952	30.995.077.965	112,16	78,13	75,00	96,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.046.276.788	8.011.085.541	99,87	100,00	97,50	97,50
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	5.001.024.525	4.944.976.728	98,96	76,18	72,94	95,75
Dinas Perhubungan	17.991.411.166	17.608.699.473	97,77	90,50	89,74	99,15
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.799.575.831	5.735.322.515	97,66	88,33	91,11	103,14
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	12.657.412.755	12.297.276.922	98,78	167,02	159,16	95,29
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.416.402.958	5.326.247.584	98,13	100,00	95,40	95,40
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14.774.617.552	14.634.327.993	98,95	100,00	98,95	98,95
Statistik	29.658.000	29.658.000	100,00	60,00	68,75	114,58
Persandian	108.962.850	108.132.850	99	60,00	60,00	100,00
Kebudayaan	328.439.950	306.326.150	95,62	89,50	88,28	98,64
Kearsipan	5.095.259.628	5.058.023.107	96,94	65,00	65,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9.917.830.978	9.683.102.371	97,91	80,87	76,20	93,72
Kelautan dan Perikanan	641.189.350	638.915.150	99,79	33,57	28,39	84,57
Pariwisata	1.603.103.000	1.596.295.385	99,76	96,25	96,25	100,00
Pertanian	2.627.667.228	2.603.016.936	99,45	65,40	66,52	101,71
Perdagangan	2.575.518.300	2.510.500.300	90,66	100,00	76,05	76,05
Perindustrian	2.434.253.600	2.298.373.600	98,05	100,00	100,00	100,00
Transmigrasi	36.099.500	36.001.000	99,73	90,00	90,00	100,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	117.314.222.862	112.532.291.713	96,49	100,00	98,57	98,57
Sekretariat Daerah	57.236.235.624	55.650.358.900	97,00	100,00	100,00	100,00
Sekretariat DPRD	60.077.987.238	56.881.932.813	95,98	100,00	97,15	97,15
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	89.917.176.761	86.895.502.525	97,55	80,50	83,05	98,08
Perencanaan	14.881.084.025	14.382.277.124	97,95	93,33	93,33	100,00
Keuangan	57.244.122.977	54.977.295.050	94,83	100,00	97,50	97,50
Kepegawaian	7.454.019.586	7.269.134.851	95,95	100,00	92,91	92,91
Penelitian dan Pembangunan	1.209.698.400	1.202.749.680	99,43	32,50	32,50	100,00
Inspektorat Daerah	9.128.251.773	9.064.045.820	99,61	76,67	99,00	100,00
UNSUR KEWILAYAHAN	71.086.949.690	70.110.195.825	99,06	96,43	96,25	99,82
KECAMATAN	71.086.949.690	70.110.195.825	99,06	96,43	96,25	99,82
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	21.565.376.428	21.360.004.605	97,51	100,00	85,03	85,03
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.565.376.428	21.360.004.605	97,51	100,00	85,03	85,03

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Penilaian rata-rata capaian kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diklasifikasikan dengan kriteria, sebagai berikut:

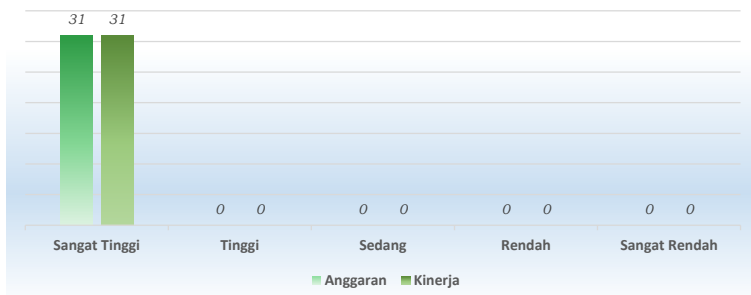
Tabel 2.60
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria
$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
$76 \leq 90$	Tinggi
$66 \leq 75$	Sedang
$51 \leq 65$	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Secara umum capaian realisasi anggaran dan kinerja masing-masing perangkat daerah di Kota Sukabumi pada tahun 2023 sangat baik. Rata-rata perangkat daerah masuk dalam kriteria sangat tinggi dalam hal penyerapan anggaran maupun kinerjanya, dan tidak ada perangkat daerah yang masuk dalam kriteria sedang atau lebih rendah dari itu. Jumlah Perangkat Daerah di Kota Sukabumi berdasarkan kriteria capaian anggaran dan kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.18
Jumlah Perangkat Daerah Berdasarkan Kriteria Capaian Anggaran dan Kinerja Tahun 2023



Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Dalam hal penyerapan anggaran, Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan mencapai 90,66% termasuk kriteria **Tinggi**. Sementara untuk capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan capaian 84,57% termasuk kriteria **Tinggi**. Secara umum, realisasi anggaran dan capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah termasuk kriteria **Sangat Tinggi**.

Tabel 2.60
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2024
Triwulan I

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	84.898.252.700	13.241.293.166	15,60	100	80	80,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	59.889.800	0	0,00	0,20	0,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10.000.000	0	0,00	100		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	30.000.000	0	0,00	75		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	97.889.200	71.399.200	72,94	13		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	120.677.000	0	0,00	55		0,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	16.000.000	0	0,00	60		0,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	35.000.000	0	0,00	76		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	65.625.000	0	0,00	55		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.667.404.643	35.006.702.858	20,16	100		0,00
Dinas Kesehatan						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	69.721.229.996	5.068.251.889	7,27	98,5	101,14	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.562.181.906	0	0,00	100	33	33,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	524.031.000	0	0,00	100		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.681.508.132	61.491.000	2,29	100	33	33,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	421.076.237.542	100.963.760.823	23,98	100	37	37,00
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.460.427.000	1.033.738.000	12,22	57,37	57,34	99,95

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.577.766.310	194.421.480	5,43	100	100	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.028.889.000	195.181.230	4,84	57,95	57,95	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.043.700.000	162.458.300	4,02	42,46	42,13	99,22
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.141.034.200	444.500.361	10,73	9,38	9,38	100,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.079.772.000	1.232.409.000	40,02	78,95	78,95	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14.257.809.015	1.172.760.941	8,23	85,15	84,54	99,28
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	97.500.000	0	0,00	38,01	29,24	76,93
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	693.999.080	12.775.800	1,84	70		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	476.000.000	122.997.500	25,84	100		0,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.308.000.000	69.545.000	1,61	10		0,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.050.000.000	20.340.000	1,94	1,36	1,53	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	351.360.000	0	0,00	11,38	9,76	85,76
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	30.000.000	811.000	2,70	70		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.544.528.085	4.341.272.307	27,93	100	27,41	27,41
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran						
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.087.424.500	470.740.000	15,25	100	100	100,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	175.999.250	50.720.000	28,82	100	100	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.494.483.912	2.869.305.606	27,34	100	39,00	39,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.319.950.700	128.055.000	3,86	0,55		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.610.312.309	1.050.355.241	29,09	100	25	25,00
Dinas Sosial						
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.116.090.000	228.125.000	20,44	25	10	40,00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.500.000	0	0,00	100		0,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	387.876.000	36.840.000	9,50	100	11,53	11,53
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	599.458.850	75.390.000	12,58	100	0,02	0,02
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	338.070.420	55.300.000	16,36	100	25,15	25,15
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25.915.000	0	0,00	100		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.927.645.731	1.197.546.437	24,30	100	30,30	30,30
Dinas Tenaga Kerja						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.702.300.139	945.937.333	25,55			
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	20.000.000		0,00			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	440.000.000	430.000	0,10			
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	30.000.000	2.023.000	6,74			
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	75.149.800	30.301.900	40,32			
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	87.000.000	2.850.000	3,28			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	94.350.000	4.900.000	5,19	79		0,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	183.917.050	25.982.000	14,13	0,01		0,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	451.097.510	85.676.102	18,99	72,5	100	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	24.999.900	18.599.900	74,40	2	1	50,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	74.089.750	6.528.150	8,81	2	2	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	389.179.200	56.257.000	14,46	0,03		0,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	282.290.000	69.044.400	24,46	12,5	53,85	100,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.045.514.613	288.161.000	9,46	65	100	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.106.853.500	15.883.750	0,75	62	100	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.869.696.434	2.029.535.237	34,58	100	35	35,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	5.680.000	0	0,00	25	25	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.157.278.700	58.985.000	1,87	22	75	100,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	113.650.000	1.950.000	1,72	90	23,53	26,14
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	15.195.000	15.195.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6.749.400	6.749.400	100	89,00	89,00	100,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6.749.400	1.170.000	17,33	89		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	474.991.150	66.743.150	14,05	25,87	26	100,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	59.020.000	1.750.000	2,97	110	25	22,73

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	708.724.500	182.687.500	25,78	5902,7	1534,0	25,99
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	561.956.000	80.370.320	14,30	100	100	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	195.852.380	32.453.380	16,57	100	100	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	8.629.500	7.380.000	85,52	30	30,28	100,00
Dinas Lingkungan Hidup						
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	314.195.550	0	0,00	100		0,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.637.489.400	69.208.036	4,23	0		#DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	237.703.450	11.035.000	4,64	25,50		#VALUE!
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	23.980.000	21.025.000	87,68	100	20	20,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	41.263.100	8.400.000	20,36	100	17,5	17,50
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.500.000	1.593.000	3,66	33		0,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	21.731.100	8.100.000	37,27	25		0,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	54.483.650	5.316.900	9,76	100	55,56	55,56
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.409.538.686	266.855.050	2,84	99	25	25,25
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.634.601.681	6.827.196.502	25,63	100	49	49,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	300.665.600	113.120.000	37,62	100	100	100,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	72.265.500	40.975.000	56,70	100	100	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	126.722.000	21.259.000	16,78	100	100	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8.850.000	650.000	7,34	100	100	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.116.923.883	1.983.300.611	32,42	100	100	100,00
Dinas Komunikasi dan Informatika						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	481.674.250	247.434.750	51,37	90		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	373.239.000	40.728.000	10,91	93		0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29.658.000	0	0,00	60		0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	125.041.450	10.573.750	8,46	77		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.616.104.731	1.431.853.749	25,50	80	29,69	37,11
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan						
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	19.000.000	17.600.000	92,63	11,33		0,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	35.010.000	12.180.000	34,79	6,8		0,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	20.000.000	0	0,00	64		0,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	203.704.250	0	0,00	19,83		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	81.400.000	0	0,00	19,83		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.066.717.450	83.280.689	4,03	0,01		0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	350.000.000	0	0,00	0,47		0,00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	35.250.000	4.090.000	11,60	100		0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.315.501.150	106.548.250	8,10	60		0,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	80.050.500	4.745.000	5,93	5,88		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	47.790.000	0	0,00	0		#DIV/0!
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	130.980.000	32.693.350	24,96	28,57		0,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	75.470.000	0	0,00	100		0,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.084.516.000	69.193.000	6,38	3,55		0,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	56.392.000	2.384.000	4,23	100		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	616.246.000	381.293.500	61,87	100		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.432.767.872	2.123.117.648	25,18	100		0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	64.999.950	32.565.900	50,10	10	10	100,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	463.488.150	73.101.000	15,77	80		0,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	628.116.450		0,00	10		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	109.688.500	33.759.441	30,78	100		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.094.632.865	1.614.127.106	31,68	90		0,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	906.225.000	441.474.500	48,72	80		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.560.176.700	1.653.938.505	64,60	18		0,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.788.779.000	66.730.250	1,76	20		0,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	161.835.500	23.785.500	14,70	4		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	66.947.500	1.572.500	2,35	16		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	266.712.500	12.230.000	4,59	150		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.356.500.582	1.570.759.647	24,71	100		0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.954.557.878	4.925.321.457	99,57	66,00	66,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	4.808.712.700	109.006.650	2,27	72		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	126.541.150	27.255.200	21,54	63,5	9,38	14,77
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	28.500.000	16.405.000	57,56	66,8		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.168.810.724	1.456.545.207	28,18	100		0,00
Sekretariat Daerah						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.764.343.219	1.342.863.268	10,52	100	25	25,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	541.978.000	165.886.544	30,61	100	25	25,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.560.092.471	10.380.747.725	29,19	100	25	25,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Sekretariat DPRD	60.077.987.238	56.881.932.813	95,98	100,00	97,15	97,15
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.258.439.450	5.942.500.726	30,86	100	27	27,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.179.897.643	10.653.807.877	29,45	100	30	30,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.276.582.850	996.053.158	43,75	100		0,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.259.757.900	481.495.693	11,30	100		0,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	969.797.000	76.651.650	7,90	100		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.762.653.123	2.514.234.440	25,75	100		0,00
Inspektorat Daerah	9.128.251.773	9.064.045.820	99,61	76,67	99,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	648.320.000	99.047.900	15,28	78	96,15	100,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	692.638.000	19.650.000	2,84	3,21		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.386.996.934	2.036.868.297	24,29	90	25,56	28,40
Dinas Perhubungan						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.926.813.227	548.852.983	13,98	100	22	22,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.312.680.966	4.457.243.602	27,32	100	28	28,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.887.625.070	1.123.858.267	28,91			#DIV/0!

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.145.118.407	7.255.349.869	19,02			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12.899.365.379	3.168.967.843	24,57			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.440.257.350	250.477.560	17,39			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.845.035.080	1.099.478.853	28,59			
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	470.545.495	40.722.650	8,65			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.075.321.084	80.540.850	7,49			
Kecamatan Cikole						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.845.192.200	13.205.740	0,72	100	25	25,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.784.060.600	480.030.000	17,24	100	35	35,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.024.700	24.928.600	35,10	100	100	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.349.550	3.259.600	21,24	100	100	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.349.501.410	2.355.872.217	25,20	100	15	15,00
Kecamatan Gunung Puyuh						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.417.679.900	10.175.600	0,72	100	25	25,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.841.671.350	322.767.200	17,53	100	33,33	33,33
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.314.950	24.246.400	36,56	100	25	25,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.500.000		0,00	100	25	25,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.989.923.487	1.895.303.457	27,11	100	25	25,00
Kecamatan Cilamiang						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.234.594.500	74.149.750	6,01	97	25,77	26,57
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.066.046.050	364.192.100	17,63	100	36	36,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.258.350	11.070.000	23,93	100	25	25,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.499.950		0,00	100		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.159.351.981	2.137.548.518	26,20	100	39	39,00
Kecamatan Warudoyong						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.581.550.400	45.271.200	2,86	88	39,77	45,19
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.284.278.980	368.642.600	16,14	100	43	43,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.873.150	15.508.950	33,81	100	38	38,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.774.000	14.890.000	29,92	1	37	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.368.138.049	2.308.973.304	27,59			#DIV/0!
Kecamatan Baros						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.148.412.850	45.567.050	3,97	100	51	51,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.547.548.750	291.963.300	18,87	100		0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.532.950	15.082.950	22,67	100		0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.616.400	4.585.300	23,37	100	16	16,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.302.973.891	1.567.569.627	24,87	100	17	17,00
Kecamatan Lembursitu						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.459.018.500	7.711.200	0,53	100	25	25,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.941.108.323	311.766.100	16,06	100	33,33	33,33
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.121.600	7.927.200	17,19	100	25	25,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.370.000	1.350.000	10,10	100	25	25,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.617.278.019	2.029.373.810	26,64	100	25	25,00
Kecamatan Cibeureum						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.216.914.275	48.357.475	3,97	80	93,75	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.667.417.200	211.599.200	12,69	31	32,26	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.286.400	21.647.600	51,19	75	133,33	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.221.875	1.894.375	6,27	100	17	17,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.251.042.664	1.817.425.622	25,06	100	47	47,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	810.136.948	69.974.500	8,64	100	54	54,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	864.579.239	90.819.258	10,50	100	50	50,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	669.637.250	421.600.000	62,96	100	58	58,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	378.959.500	58.342.500	15,40	100	28	28,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	25.904.300.300	299.245.000	1,16	100	24	24,00

Sumber: Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2024 diolah, Bappeda 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dan kinerja hingga triwulan I tahun 2023 belum ada yang mencapai target karena masih banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan karena beberapa faktor, misalnya karena belum waktunya dilaksanakan atau masih dalam tahapan persiapan. Dalam kerangka acuan kerja masing-masing subkegiatan di perangkat daerah rata-rata capaian kinerja baru dapat terlihat di awal triwulan III.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang diencanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari pendayagunaan kekuatan yang belum optimal serta kelemahan yang belum teratasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan berbagai isu pembangunan maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama/permasalahan daerah yang harus diselesaikan Kepala Daerah serta seluruh Perangkat Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan berkaitan dengan kondisi fisik geografi di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Alih fungsi lahan yang massif untuk permukiman; (2) Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau; (3) Pengelolaan kawasan lindung yang belum optimal; (4) Sistem pangan yang belum optimal (5) Risiko bencana terutama gempa bumi, banjir, dan tanah longsor cukup besar.

Permasalahan demografi berdasarkan kondisi umum daerah dan proyeksi yang telah dilakukan di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Belum adanya perubahan paradigma terkait bonus demografi yang seharusnya lebih menekankan pada konfigurasi tingkat pendidikan penduduk; (2) Kontribusi perempuan dalam pembangunan belum optimal; (3) Belum optimalnya pengelolaan SDM terintegrasi baik sektor publik maupun swasta serta pemberdayaan yang inklusif; dan (4) Keberlangsungan kehidupan masyarakat adat ditengah arus globalisasi yang belum sepenuhnya tertangani.

2.3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesejahteraan ekonomi di Kota Sukabkumi antara lain: (1) Adanya kesenjangan distribusi kekayaan di masyarakat; (2) Pertumbuhan ekonomi masih cenderung stagnan dan berada dibawah angka Jawa Barat; (3) Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan,

dan ekonomi masih belum optimal; (4) Terbatasnya lapangan kerja menyebabkan TPT masih tinggi; dan (5) IPM skala kota masih cukup rendah dibanding kota lain di Jawa Barat.

2.3.1.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Permasalahan kesejahteraan sosial budaya berdasarkan kondisi umum di Kota Sukabumi antara lain: (1) Belum merata dan tercukupinya SDM Kesehatan serta penanganan ketahanan kesehatan; (2) Belum optimalnya pemberian pelayanan sosial; (3) Minimnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial; (4) Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; (5) Rendahnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga; (6) Kurangnya minat masyarakat dalam melestarikan seni budaya tradisional; (7) Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat; dan (8) Masih tingginya kenakalan remaja.

2.3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1.3.1 Daya Saing Ekonomi

Permasalahan daya saing ekonomi di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Belum optimalnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital; (2) Kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita di wilayah utara-selatan; (3) Belum optimalnya pola kemitraan koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar; (4) Belum optimalnya ekosistem wirausaha; (5) Masih rendahnya IKM produktif; (6) Proses perizinan usaha yang dianggap masih berbelit dan mahal; (7) Inklusivitas pembangunan ekonomi; dan (8) Penguatan ekosistem ekonomi digital.

2.3.1.3.2 Daya Saing SDM

Permasalahan daya saing SDM di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Kualitas dan kuantitas pendidikan yang masih rendah; (2) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kerja masyarakat; (3) Kurang optimalnya pengembangan *softskill*; (4) Kurangnya literasi digital masyarakat; (5) Kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah; (6) Belum optimalnya pendidikan karakter masyarakat.

2.3.1.3.3 Daya Saing Infrastruktur

Permasalahan daya saing infrastruktur di Kota Sukabumi berdasarkan kondisi umum daerah, antara lain: (1) Konektivitas antar wilayah masih belum memperhatikan daya dukung dan daya tampung

lingkungan; (2) Masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur; dan (3) Belum optimalnya penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan.

2.3.1.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing iklim investasi di Kota Sukabumi, diantaranya: (1) Belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi UMKM; (2) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; (3) Masih adanya pelanggaran PERDA; dan (4) Konflik sosial di masyarakat masih sering terjadi.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah kembali normal atau kembali seperti kondisi sebelum masa pandemi Covid-19. Namun, menurunnya harga komoditas berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa tumbuh lebih cepat.

Indonesia dalam tiga tahun terakhir telah mengalami kondisi perekonomian yang luar biasa atau *extraordinary* secara dua arah. Pertama, pada periode 2021-2023, perekonomian Indonesia berada di bawah normal, yakni pertumbuhannya berkisar 2-4 persen.

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US\$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, Gross National Income per kapita Indonesia tahun 2023 diperkirakan sebesar US\$4.750 mempertahankan predikat kategori upper-middle income country yang dicapai di tahun 2022. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini. Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,02 persen didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan pemilihan umum (presiden dan legislatif pada Februari serta kepala daerah pada November). Inflasi domestik diperkirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto yang diperkirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diperkirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi.

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2023 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,00 persen (yoy). Besaran PDRB Jawa Barat triwulan I 2023 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 637,20 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp407,85 triliun. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berdasarkan pengeluaran adalah Konsumsi Pemerintah 6,96 persen dan berdasarkan lapangan usaha adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,19 persen.

Pada Maret 2023, Jawa Barat mengalami Deflasi sebesar 0,18 persen (mtom), sedangkan untuk gabungan 7 kota di Jawa Barat terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 5,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,85. Sedangkan, persentase penduduk miskin di Jawa Barat pada September 2022 adalah sebesar 7,98 persen dengan Gini rasio sebesar 0,412 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode Maret 2022. Sementara tingkat pengangguran turun sebesar 0,46 persen dari periode sebelumnya menjadi 7,89 persen atau 2,01 juta orang pada Februari 2023.

Indikator kesejahteraan lain yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada bulan Maret 2023 masing-masing sebesar

105,17 turun 1,43 persen dibanding NTP Februari 2023 dan untuk NTN Jawa Barat Februari 2023 sebesar 110,79 naik 0,37 persen dari bulan sebelumnya.

Sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di Indonesia, Nasional pada tahun 2023. Sementara di sektor lapangan usaha industry pengolahan, Jawa Barat memberikan kontribusi 28,26 persen terhadap PDB ADHB sektor Industri Pengolahan nasional. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Jawa Barat memiliki tingkat dan arah pertumbuhan yang berada di sekitar Tingkat pertumbuhan nasional. Hal ini sebagaimana ditunjukkan padaperekonomian Jawa Barat memberikan kontribusi 16,77 persen dari PDB ADHB Dinamika pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 cenderung stabil di kisaran 5 persen. Prospek pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara positif bertahan hingga triwulan I dan II tahun 2023, meskipun terdapat penurunan capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan III (4,6 persen), capaian pertumbuhan di tingkat 5 persen kembali dicapai pada triwulan IV-2023, hal ini menunjukkan tren positif yang berkelanjutan.

Perbaikan mulai terlihat pada triwulan IV seiring dengan berakhirnya krisis produksi sektor pertanian akibat El Nino, serta peak season selama natal dan tahun baru. Kondisi yang membaik ini terjadi di seluruh sektor lapangan usaha, dimana tidak ada sektor yang tumbuh negatif secara year-on-year, berbeda dengan triwulan III dimana sektor pertanian, administrasi pemerintahan, pengadaan listrik, dan pengadaan air tumbuh negatif.

Adapun kondisi perekonomian global yang mempengaruhi kinerja perekonomian Jawa Barat selama tahun 2023 adalah adanya pemulihan ekonomi yang terlihat dari meredanya tekanan inflasi di berbagai negara, stabilitas harga energi, dan terjaganya tingkat permintaan global. Kondisi ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi year-on-year yang stabil di beberapa negara mitra dagang terbesar Jawa Barat pada triwulan I-2023, seperti Amerika Serikat (1,6 persen), Tiongkok (4,5 persen), dan Jepang (1,3 persen). Pada triwulan II-2023, pemulihan ekonomi semakin terasa seiringdengan pencabutan status darurat COVID-19 oleh WHO, sehingga rantai pasok global, biaya, dan waktu pengiriman kembali ke level sebelum pandemi. Pada triwulan II-2023.

Pertumbuhan ekonomi year-on-year negara mitra dagang terbesar Jawa Barat juga mengalami peningkatan, seperti Amerika Serikat (2,6 persen), Tiongkok (6,3 persen), dan Jepang (2,0 persen). Sementara itu pertumbuhan global diproyeksikan turun menjadi 3,0 persen pada tahun 2023 dan 2024.

Kenaikan suku bunga kebijakan bank sentral untuk melawan inflasi terus membebani aktivitas perekonomian. Inflasi umum global diperkirakan akan turun menjadi 6,8 persen pada tahun 2023 dan 5,2 persen pada tahun 2024, kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan performa ekspor Jawa Barat

3.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah;

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Sukabumi tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15,35 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 9,80 triliun rupiah. Ekonomi Kota Sukabumi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh positif sebesar 5,35 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,08 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,90 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2023 dari sisi lapangan usaha disumbangkan oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor dengan andil sebesar 1,54 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,98 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi paling tinggi terhadap pembentukan PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 yaitu sebesar 37,59 persen. Dari sisi pengeluaran, peranan terbesar disumbangkan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 81,49 persen.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar

Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Sukabumi tahun 2023 menunjukkan kinerja positif Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen sepanjang tahun 2023. Geliat positif dalam perekonomian terjadi pada seluruh kategori perekonomian di Kota Sukabumi. Secara umum, struktur perekonomian Kota Sukabumi masih didominasi oleh lima kategori lapangan usaha yaitu kategori C (Industri Pengolahan), F (Konstruksi), G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor), H (Transportasi dan Pergudangan) dan kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi). Kategori G memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sukabumi yaitu sebanyak 38 persen. Kelima kategori tersebut secara serentak berkontribusi sebesar 71,97 persen terhadap PDRB Kota Sukabumi tahun 2023. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023. Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2023 yaitu mencapai 9,08 persen. Kemudian diikuti oleh Kategori M,N (Jasa Perusahaan) sebesar 8,04 persen, Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar 7,81 persen, Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) sebesar 7,71 persen serta Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) sebesar 7,17 persen.

Masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid 19 tercermin pada pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tahun 2021 yang sebesar 3,71 persen. Geliat perekonomian Kota Sukabumi tahun 2022 terjadi secara signifikan, terbukti dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,35 persen. Berbagai program pemulihan ekonomi yang dilancarkan oleh pemerintah tercermin hasilnya pada pertumbuhan positif di hampir seluruh lapangan usaha. Di tahun 2023 perekonomian Kota Sukabumi tetap tumbuh positif, namun mengalami perlambatan kecepatan

dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,12 persen. Lapangan Usaha dengan laju pertumbuhan dominan, tampak berbeda antar tahun. Jika di tahun 2021, lapangan usaha M,N (Jasa Perusahaan) tampil mendominasi, maka di tahun 2022 lapangan usaha R,S,T,U (Jasa Lainnya) adalah yang tertinggi dibanding yang lain dan lapangan usaha H (Transportasi) memiliki pertumbuhan yang tertinggi untuk tahun 2023.

Struktur PDRB pengeluaran Kota Sukabumi tahun 2023 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yang menyumbang 81,49 persen terhadap PDRB tahun 2023, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 16,02 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 10,60 persen dan komponen Konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 4,56 persen. Sementara itu komponen ekspor neto dan Perubahan inventory yang bernilai negatif, merupakan komponen pengurang dalam PDRB, masing-masing memiliki kontribusi sebesar 12,66 persen dan 0,02 persen.

Perekonomian tampak mulai pulih yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi kembali positif karena ditunjang oleh kinerja positif dari seluruh komponen. Perekonomian membaik di tahun 2022 dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan diwarnai oleh peranan komponen LNPRT yang dominan. Pada tahun 2023 komponen LNPRT masih mendominasi laju pertumbuhan dari sisi pengeluaran, walau kecepatan pertumbuhan PDRB mengalami perlambatan disbanding tahun sebelumnya. Masa tahun politik di 2022-2023 ditandai dengan pertumbuhan di komponen LNPRT yang cukup menonjol.

PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran makro rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun dalam suatu wilayah tertentu dan biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sementara PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Berikut menunjukkan perkembangan PDRB perkapita dari Tahun 2019 hingga 2023 atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

Tabel 3.1
PDRB Per Kapita Kota Sukabumi Tahun 2019 - 2023

No	PDRB Per Kapita	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam milyar rupiah	37,68	37,50	37,21	39,82	42,56
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam milyar rupiah	26,35	25,80	25,23	26,16	27,18

Sumber: Hasil analisis Bappeda

PDRB per kapita Kota Sukabumi baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 menunjukkan kenaikan, tetapi antara tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 2.74 persen untuk ADHB dan 1.02 persen untuk ADHK. Persentase Pertumbuhan PDRB per Kapita terbesar ada pada tahun 2022 yaitu sebesar 3.79 persen.

3.2.2 Inflasi

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah adalah dari nilai inflasi. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Triwulan I sampai dengan bulan April 2024 secara umum menunjukkan adanya penurunan dari bulan Maret. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kota Sukabumi, mencatat Kota Sukabumi mengalami inflasi sebesar 2,88 persen pada April 2024 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,6. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,09 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,11 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,73 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,73 persen; kelompok kesehatan sebesar 4,21 persen, kelompok transportasi sebesar 0,31 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,13 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,81 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,12 persen Secara inflasi month to month (mtm) Maret 2024 sebesar 0,05 persen dan tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Sukabumi bulan April 2024

masing-masing sebesar 0,17 persen dan 1,64 persen year to date (ytd) Oktober 2023 sebesar 2,19 persen.

Tabel 3.2

IHK dan Tingkat Inflasi Kota Sukabumi Desember 2023, Tahun Kalender 2024, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2023	IHK Desember 2023	IHK Mei 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Mei 2024 ^a (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Mei 2024 ^b (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Mei 2024 ^c (%)	Andil Inflasi m-to-m Mei 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Mei 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	103,81	104,88	106,43	-0,16	1,48	2,52	-0,16	2,52
Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,81	107,43	111	-0,42	3,32	5,91	-0,12	1,65
Pakaian dan Alas Kaki	102,65	103,98	104,95	0,06	0,93	2,24	0,00	0,12
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,73	101,04	101,39	0	0,35	0,66	0,00	0,09
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,85	102,43	101,91	-0,35	-0,51	0,06	-0,02	0,00
Kesehatan	101,55	102,05	104,91	0,02	2,8	3,31	0,00	0,10
Transportasi	111,06	111,51	111,24	-0,6	-0,24	0,16	-0,08	0,02
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,84	100,41	99,03	0	-1,37	-1,79	0,00	-0,12
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,60	103,28	105,75	0	2,39	3,07	0,00	0,07
Pendidikan	100,96	100,99	101,05	0	0,06	0,09	0,00	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,06	103,41	104,97	0,07	1,51	1,85	0,01	0,20
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103,09	104,95	110,36	0,82	5,15	7,05	0,05	0,38

Keterangan:

^a Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK April 2024.

^b Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK Desember 2023.

^c Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK Mei 2023.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Sukabumi Mei 2024 Indeks Harga Konsumen/Inflasi Menurut Kelompok Perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Sukabumi, pada Mei 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,52 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,81 pada Mei 2023 menjadi 106,43 pada Mei 2024. Tingkat deflasi m-to-m dan tingkat inflasi y-to-d masing-masing sebesar 0,16 persen dan 1,48 persen.

Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,31 persen, kelompok transportasi sebesar 0,16 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,07 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,85 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar

7,05 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Mei 2024, antara lain: beras, emas perhiasan, bawang merah, sewa rumah, sigaret kretek mesin (SKM), daging ayam ras, pisang, nasi dengan lauk, sigaret putih mesin (SPM), bawang putih, kopi bubuk, popok bayi sekali pakai (diapers), daun bawang, ayam goreng, rekreasi dan lainnya. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: laptop/notebook, bahan bakar rumah tangga, angkutan antar kota, sabun detergen bubuk, jeruk, cabai rawit, taman kanak-kanak, baju kaos tanpa kerah/t-shirt anak, bensin, telur ayam ras dan lainnya. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Mei 2024, antara lain: bawang merah, emas perhiasan, telur ayam ras, pisang, sigaret kretek tangan (SKT), upah asisten rumah tangga, sepeda motor dan lainnya. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: beras, angkutan antar kota, daging ayam ras, sabun detergen bubuk, tomat, daging sapi, bawang putih, cabai rawit dan lainnya. Pada Mei 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,65 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,12 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,09 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok transportasi sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,07 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,20 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,38 persen.

3.2.3 Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,30 persen dari 8,83 persen di tahun 2021 menjadi 8,53 persen di tahun 2023. Angka tersebut juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,06 persen. Menurunnya TPT Kota Sukabumi tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa). Hal ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat Kota Sukabumi yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama) yang mencapai 26,64 persen di tahun 2023. Berdasarkan dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024- 2026, target TPT Tahun 2024 adalah sebesar 8,41%, menurun dari capaian Tahun 2023 sebesar 8,53 %. Target ini cukup tinggi dan berat untuk dicapai, sehingga tentunya dibutuhkan berbagai strategi dan program dalam melakukan intervensi sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

3.2.4 Kemiskinan

Capaian penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2023 lebih baik jika dibandingkan tahun 2022. Capaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun penurunan kemiskinan yang dicapai tersebut tidak lepas dengan geliat ekonomi yang terjadi pasca Covid-19. Penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2023 tersebut masih lebih baik jika dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Target persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 berdasarkan dokumen RPD adalah sebesar 8,00 %. Apabila melihat target yang ditetapkan, maka target tersebut cukup realistis untuk tercapai sehubungan angka capaian persentase penduduk miskin tahun 2023 Penduduk miskin Kota Sukabumi tahun 2023 sekitar 24,96 ribu jiwa atau 7,50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Meskipun demikian, kinerja Pemerintah Kota Sukabumi dalam menurunkan angka kemiskinan cukup baik terutama di tahun 2019 dan 2020 Kota Sukabumi berhasil menangani kemiskinan dengan pencapaian yang melebihi dari target yang telah ditetapkan Berdasarkan hal tersebut, maka persentase penduduk miskin harus menjadi perhatian

khusus untuk dilakukan berbagai upaya dan langkah dalam melakukan pencapaian target tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan sungguh- sungguh dan ditambah dengan pelaksanaan jarring pengaman social dalam rangka mencegah meningkatnya angka kemiskinan.

3.2.5. Indeks Gini

Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar terciptanya pemerataan pada tatanan pendapatan di masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Sukabumi yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,45. Angka ini menurun 0,03 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada tahun 2022. sesuai target pada RPD kota sukabumi Tahun 2025 Rasio Gini sebesar 0,470, melihat realisasi pada 2023 target tersebut optimis dapat tercapai.

Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Selain mempertimbangkan proyeksi indikator di atas, beberapa asumsi-asumsi yang bisa dijadikan dasar bagi perencanaan Tahun 2024 Perubahan diantaranya adalah:

1. Inflasi yang diperkirakan terjaga;
2. Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali stabil;
3. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli dan sebagainya;
4. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal tetapi memerlukan dukungan stimulus modal;

5. Aktivitas industri manufaktur, investasi dan pariwisata mulai bergerak (kapasitas produksi dan tenaga kerja) terkait penerapan protokol kesehatan pada lini produksi;
6. Proyek-proyek infrastruktur yang tertunda mulai berjalan kembali.

Selama kurun waktu 2020-2023 hanya tahun 2020 capaian Gini Rasio melampaui target yang ditetapkan. Walaupun demikian tingkat ketimpangan pada Tahun 2022 masih dalam kategori sedang/moderat.

Tabel 3.10
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi Tahun 2024

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2023	2024 (RPD)	2024 (P-RKPD)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,16	75,55	77,55
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,50	8,00	7,25
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,53	8,41	8,41
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,12	5,37	5,37
5	Indeks Gini/ Gini Rasio	Angka	0,450	0,475	0,425

Sumber: Bappeda

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan proyeksi ekonomi makro Semester II Tahun 2024 sebagai berikut:

1) Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Proyeksi Nilai IPM Kota Sukabumi Tahun 2024 berdasarkan target RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebesar 75,55 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar 77,16 target tersebut telah terlampaui. Untuk itu pada perubahan RKPD ini maka terjadi koreksi target IPM me jadi 77,55. Selama periode 2020–2023, IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2013, status pembangunan manusia Kota

Sukabumi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2020–2023 IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 75,06 pada tahun 2020 menjadi 77,16 pada tahun 2023. IPM Kota Sukabumi berada di atas IPM Jawa Barat sepanjang periode 2020- 2023. Peningkatan IPM tahun 2023 IPM didukung oleh semua dimensi penyusunnya, baik dimensi umur

panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak. Indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami akselerasi pertumbuhan di 2023 sebesar 5,08 persen. Sedangkan dua indikator yang mengalami perlambatan pertumbuhan di 2023 dibanding tahun sebelumnya adalah Umur Harapan Hidup (UHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan masing-masing 0,33 persen dan 2,2 persen. Kecepatan pertumbuhan pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) bergerak stabil sama seperti di tahun 2022, yaitu 0,07 persen.

Namun demikian, tentu kewaspadaan harus terus ditingkatkan terutama untuk sektor yang terkait dengan pencapaian IPM seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dari sisi pendidikan, dengan rencana akan dimulainya kembali pendidikan dengan tatap muka semoga juga menjadi pendorong peningkatan IPM dan dari sisi ekonomi perlu terus didorong peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan UMKM. Tingkat inflasi sampai dengan bulan April 2024 year on year (yoy) 2,88 persen masih di atas target yang ditetapkan tetapi masih dalam ambang batas terkendali sehingga tidak akan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat secara signifikan.

2) Proyeksi Persentase Penduduk Miskin

Salah satu permasalahan yang terus menjadi beban pemerintah dan menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan manusia adalah kemiskinan. Dengan kemiskinan ini selalu dijadikan alasan sebagai penghambat masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain, oleh sebab itu maka penanggulangan kemiskinan perlu aksi dan upaya dari berbagai sektor yang berkaitan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Capaian persentase penduduk miskin tahun 2023 berdasarkan data BPS adalah sebesar 7,50 persen, sedangkan target RPD pada tahun 2024 adalah sebesar 8,00 persen. Berdasarkan fenomena yang ada bahwa aktifitas ekonomi penduduk Kota Sukabumi masih belum stabil dan kembali normal seperti masa sebelum pandemic covid-19 serta tingkat inflasi yang masih fluktuatif di atas target yang telah ditetapkan, hal ini akan menjadi tantangan yang berat dalam Upaya pencapaian target untuk indikator persentase penduduk miskin tahun 2023 yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian target persentase penduduk miskin untuk tahun 2024 semula di targetkan 8,00 persen disesuaikan menjadi 7,25 persen.

3) Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan sangat berkorelasi erat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Dampak dari pandemi *Covid-19* pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (pekerja/buruh). Sektor usaha yang memberlakukan kebijakan untuk merumahkan pekerja/buruh selama pandemi *Covid-19* adalah sektor industri, sektor akomodasi/restoran dan sektor usaha manufaktur. Sektor usaha yang merumahkan paling sedikit pekerja/buruh adalah industri elektronik dan kontruksi.

Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka Kota Sukabumi pada Tahun 2023 adalah sebesar 8,53 persen menurun dibanding Tahun 2022 sebesar 8,83 persen. Pada tahun 2024 ini berdasarkan dokumen RPD Kota Sukabumi target TPT adalah

sebesar 8,41 persen, untuk itu maka perlu upaya-upaya yang cukup terukur untuk bisa mencapai yang telah ditetapkan tersebut.

4) Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perekonomian Kota Sukabumi tahun 2023 tampak berjalan relatif stabil selama 2 tahun terakhir, dilihat dari Laju pertumbuhan PDRB dapat dipandang sebagai penambahan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 9.801,88 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 477,72 miliar rupiah dari 9.324,16 miliar rupiah pada tahun 2022 Sementara pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. Target LPE Tahun 2024 berdasarkan dokumen RPD adalah sebesar 5,37 persen, angka tersebut selanjutnya ditetapkan pula menjadi target pada perubahan RKPD ini. Semoga pertumbuhan ekonomi di sisa 6 (enam) bulan Tahun 2024 ini bisa semakin membaik sehingga target yang ditetapkan bisa tercapai.

5) Proyeksi Indeks Gini/ Gini Rasio

Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar terciptanya pemerataan pada tatanan pendapatan di masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Sukabumi yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,450. Angka ini menurun 0,03 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada tahun 2022. Sesuai target pada RPD Kota Sukabumi Tahun 2025 Rasio Gini sebesar 0,475, maka dengan melihat realisasi pada

2023 sebesar 0,450 dilakukan penyesuaian target pada perubahan RKPD ini yaitu sebesar 0,440.

Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Selain mempertimbangkan proyeksi indikator di atas, beberapa asumsi-asumsi yang bisa dijadikan dasar bagi perencanaan Tahun 2024 semester II ini diantaranya adalah:

1. Belanja pemerintah daerah diarahkan kepada pemulihan ekonomi serta pengendalian inflasi.
2. Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali stabil;
3. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli dan sebagainya;
4. Meningkatnya aktivitas ekonomi, investasi dan pariwisata;
5. Fungsi pusat-pusat perekonomian seperti destinasi wisata, pasar rakyat, dan lain-lain bisa beroperasi sesuai fungsinya secara optimal;

3.3 Kebijakan Umum Perubahan RKPD Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun 2024 dilakukan karena diperlukannya penyesuaian perolehan pendapatan daerah, penyesuaian alokasi belanja daerah, dan perubahan pada sisi sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA 2024. Selain itu terjadinya dinamika pada beberapa kegiatan yang memerlukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sesuai dengan peralihan peruntukan output program dan kegiatan.

Prioritas pembangunan pada Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun 2024 senantiasa mengacu pada RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, yang di dalamnya mencakup program-program prioritas yang telah tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Kota Sukabumi Tahun 2024 yang belum tercapai outputnya.

Berdasarkan perhitungan SiLPA tahun 2023 yang telah diaudit BPK RI, yang menghasilkan SiLPA tahun berjalan Positif, maka Pemerintah Kota Sukabumi akan memanfaatkannya untuk *program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas* yang dibutuhkan, penambahan output sub kegiatan, penambahan volume output sub kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan RKPD Tahun 2024 pada hakekatnya adalah menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang ada, dengan mempertimbangkan seluruh jenis pendapatan yang diterima baik berupa pendapatan asli daerah maupun berupa pendapatan transfer ataupun lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Melakukan digitalisasi pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah;
4. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan aparatur;
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Proses perencanaan pendapatan daerah dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan turun pada komponen, Hasil Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, serta meningkat pada komponen Hasil Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
3. Pendapatan Transfer diasumsikan menurun terutama yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang berkurang karena adanya pengurangan dari SiLPA yang terdapat di Kas Daerah serta pengurangan pendapatan dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan mengalami penurunan terutama karena ada pengurangan pendapatan kapitasi JKN.
5. Pendapatan daerah diasumsikan sebesar Rp. 1,288,241,260,246.00,- atau bertambah sebesar Rp. 4,751,047,934,00- atau sekitar 0,38

persen dari pendapatan pada APBD. Secara rinci asumsi pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah berkurang sebesar Rp.12,519,926,959,- atau sebesar 3,00 persen, dengan rincian:
 - 1) Pajak Daerah diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp. 66,635,783,945,-
 - 2) Retribusi Daerah diasumsikan bertambah sebesar Rp. 90,738,038,- atau 0,26 persen, hal tersebut berasal dari penambahan retribusi Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup serta ada pengurangan dari retribusi BLUD Rumah Sakit
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berkurang sebesar Rp. 119,014,338,- atau sekitar 2,50 persen yang berasal dari deviden Bank BJB
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berkurang dari APBD T.A 2024 sebesar 12,491,650,659,- atau sebesar 4,03 Persen, hal tersebut semuanya berasal dari berkurangnya pendapatan bersumber BLUD Rumah Sakit
- b. Pendapatan Transfer bertambah sebesar Rp. 17,403,066,697,- atau sebesar 2,12 persen dibanding dengan APBD Tahun 2024. Secara rinci perubahan pendapatan transfer dapat dilihat pada rincian dibawah ini:
 - 1) Dana perimbangan yang berasal dari komponen dana transfer umum bertambah sebesar Rp 17,403,066,697,- atau sebesar 2,35 persen, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan dari pendapatan dari DBH TDF, serta adanya pengurangan pendapatan karena adanya SiLPA tahun 2023 di kas daerah.
 - 2) Dana Insentif Daerah (DID) diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp7,583,943,000,-
 - 3) Transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan provinsi diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp110,104,453,088,-
- c. Lain-Lain Pendapatan yang sah diasumsikan menurun sebesar Rp132,091,804,- yaitu berasal dari pengurangan pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Dinas Kesehatan

Target/proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Kode	Uraian	APBD TA 2024	PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 (Parsial)	PERUBAHAN RKPD 2024	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1,251,377,983,074.00	1,283,490,212,312.00	1,288,241,260,246.00	4,751,047,934.00	0.38
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	416,860,686,061.00	415,861,936,061.00	403,342,009,102.00	(12,519,926,959.00)	(3.00)
4.1.01	Pajak Daerah	66,635,783,945.00	66,635,783,945.00	66,635,783,945.00	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	35,279,411,072.00	35,279,411,072.00	35,370,149,110.00	90,738,038.00	0.26
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,753,064,486.00	4,753,064,486.00	4,634,050,148.00	(119,014,338.00)	(2.50)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	310,192,426,558.00	309,193,676,558.00	296,702,025,899.00	(12,491,650,659.00)	(4.03)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	820,579,297,013.00	852,691,526,251.00	870,094,592,948.00	17,403,066,697.00	2.12
4.2.01	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	739,270,043,138.00	741,479,975,138.00	758,883,041,835.00	17,403,066,697.00	2.35
	1.1. Dana Perimbangan	731,686,100,138.00	733,896,032,138.00	751,299,098,835.00	17,403,066,697.00	2.38
	1 2. Dana Insentif Daerah	7,583,943,000.00	7,583,943,000.00	7,583,943,000.00	-	-
4.2.02	2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	81,309,253,875.00	111,211,551,113.00	111,211,551,113.00	-	-
	A. Dana Bagi Hasil	81,309,253,875.00	81,309,253,875.00	81,309,253,875.00	-	-
	B. Bantuan Keuangan	-	29,902,297,238.00	29,902,297,238.00	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13,938,000,000.00	14,936,750,000.00	14,804,658,196.00	(132,091,804.00)	(0.95)
	Jumlah Pendapatan Daerah	1,251,377,983,074.00	1,283,490,212,312.00	1,288,241,260,246.00	4,751,047,934.00	0.38

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2024

3.3.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yaitu meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, serta lainnya sebagai pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu mencakup pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 maupun tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan belanja yang memenuhi azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, maka penyusunan perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2022 mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Nomor: Hk.02.01/869/BAPP tentang penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 serta hal lainnya sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Ditujukan dalam memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor listrik, air, telpon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan.
2. Mengakomodir kegiatan-kegiatan DAK Luncuran dan sisa Bantuan Keuangan Provinsi tahun sebelumnya serta sumber anggaran lainnya sesuai ketentuan (Silpa hasil audit BPK);
3. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
4. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan pencapaian target program unggulan dan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah;

5. Adanya kebijakan pusat dan provinsi yang mendasarinya;
6. Seluruh perubahan agar memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama waktu dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2023.

Anggaran belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 1,337,805,497,363.00 bertambah sebesar Rp 32,864,449,128,00 atau 2,58 persen dari pagu APBD 2024. Penambahan pagu belanja ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan estimasi pendapatan yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya serta sudah mengakomodir SiLPA yang sudah ditetapkan.

Secara rinci target anggaran belanja pada perubahan RKPD Tahun 2024 terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

REK	STRUKTUR APBD	APBD TA 2024	PENJABARAN PERUBAHAN PERKADA APBD TA 2024 (Parsial)	PERUBAHAN RKPD 2024	- / +	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
2	BELANJA DAERAH	1,272,828,818,997.00	1,304,941,048,235.00	1,337,805,497,363.00	32,864,449,128.00	2.58
2.1	Belanja Operasi	1,173,720,685,620.00	1,194,193,496,539.00	1,220,878,884,903.00	26,685,388,364.00	2.27
2.1.1	Belanja Pegawai	562,665,864,626.00	564,590,369,626.00	564,590,396,626.00	-	-
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	535,999,670,185.00	554,634,709,104.00	576,820,097,468.00	22,185,388,364.00	4.14
2.1.5	Belanja Hibah	71,752,650,809.00	71,665,890,809.00	78,855,890,809.00	7,190,000,000.00	10.02
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,302,500,000.00	3,302,500,000.00	612,500,000.00	(2,690,000,000.00)	(81.45)
2.2	Belanja Modal	86,600,583,798.00	101,694,861,367.00	107,873,922,131.00	6,179,060,764.00	7.14
2.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,639,880,280.00	49,797,423,749.00	52,287,294,936.00	2,489,871,187.00	6.28
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30,421,868,358.00	30,358,019,758.00	32,493,891,285.00	2,135,871,527.00	7.02
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10,984,356,980.00	15,990,648,980.00	17,269,900,898.00	1,279,251,918.00	11.65
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,592,478,180.00	3,586,768,880.00	3,801,975,012.00	215,206,132.00	5.99
2.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,962,000,000.00	1,962,000,000.00	2,020,860,000.00	58,860,000.00	3.00
2.3	Belanja Tidak Terduga	12,507,549,579.00	9,052,690,329.00	9,052,690,329.00		

REK	STRUKTUR APBD	APBD TA 2024	PENJABARAN PERUBAHAN PERKADA APBD TA 2024 (Parsial)	PERUBAHAN RKPD 2024	- / +	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
	JUMLAH BELANJA	1,272,828,818,997.00	1,304,941,048,235.00	1,337,805,497,363.00	32,864,449,128.00	2.58
	Total Surplus/(Defisit)	(21,450,835,923.00)	(21,450,835,923.00)	(49,564,237,117.00)	(28,113,401,194.00)	131.06

3.3.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA yang berdasarkan hasil audit BPK terdapat SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp. 51,564,237,117,-. Adapaun secara rinci SiLPA tahun 2023 hasil audit tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Rekapitulasi SiLPA Tahun 2023 Hasil Audit

NO	URAIAN	JUMLAH SILPA 2023
1	Kas Daerah	26,075,639,580
2	BLUD RSUD R. Syamsudin	20,738,744,166
3	BLUD Puskesmas Selabatu	419,509,898
4	BLUD RSUD Al-Mulk	2,400,602,770
5	Kapitasi JKN	132,091,804
6	Kas Bendahara Penerimaan	56,003,268
7	BOS Pusat Reguler	179,131,391
8	BOS Pusat Kinerja	149,157,323
9	PAUD Kesetaraan	60.000.000
10	BOK PUSKESMAS	1.353,356,967
	JUMLAH	51,564,237,117

Dari data diatas, SiLPA Tahun 2024 berasal dari BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas, Jaminan Kesehatan Nasional, Bos Pusat serta yang berasal dari kas daerah, kas bendahara pengeluaran dan kas bendahara penerimaan yang akan di distribusikan di beberapa perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kebijakan umum Pembiayaan Daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk SiLPA Tahun 2024 yang berasal dari SiLPA BLUD RSUD R Syamsudin SH dan AL-Mulk, BLUD Puskesmas Selabatu, Jaminan Kesehatan Nasional dan Bos Pusat dianggarkan kembali dalam rencana belanja perubahan RKPD Tahun 2024 pada perangkat daerah berkenaan

yaitu RSUD R Syamsudin SH, RSUD Al-Mulk, BLUD Puskesmas Selabatu, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Untuk SiLPA Tahun 2023 yang berasal dari Kas Daerah setelah dikurangi SiLPA yang telah dianggarkan pada APBD murni maka akan dianggarkan kembali untuk :
 - a. SiLPA yang berasal dari DAK Non Fisik dijadikan sebagai pengurang pendapatan anggaran bersumber DAK Non Fisik sebagaimana yang sudah teranggarkan pada APBD Tahun 2024;
 - b. SiLPA yang berasal dari DAK Fisik dianggarkan kembali sesuai peruntukannya dengan mengacu pada data yang diperoleh dari aplikasi OMSIPAM KPPN Kementerian Keuangan yaitu untuk DAK Bidang Kesehatan.
 - c. SiLPA lainnya dianggarkan untuk pemenuhan belanja pegawai, prioritas pembangunan serta program lainnya sesuai kebutuhan.

Target/proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

REK	STRUKTUR APBD	APBD TA 2024	PENJABARAN PERUBAHAN PERKADA APBD TA 2024 (Parsial)	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024	- / +
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	23,450,835,923,00	23,450,835,923,00	51,564,237,117,00	28,113,401,194,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	23,450,835,923,00	23,450,835,923,00	51,564,237,117,00	28,113,401,194,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan;				
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;				
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau				
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.				
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000,00	2,000,000,000,00	2,000,000,000,00	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000,00	2,000,000,000,00	2,000,000,000,00	0
	Pembiayaan Neto	21,450,835,923,00	21,450,835,923,00	49,564,237,117,00	28,113,401,194,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkeaan	0	0	0	0

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar Rp 28.113,401,194,- yaitu berasal dari SiLPA hasil audit BPK, sedangkan pada RKPD Tahun 2024 penerimaan pendapatan baru dianggarkan sebesar Rp 23,450,835,923,-. Untuk pengeluaran pembiayaan, tidak ada penambahan pengeluaran. Setelah dibandingkan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan maka didapatkan angka pembiayaan netto sebesar Rp 49,564,237,117,-, angka tersebut sama dengan jumlah defisit pada belanja daerah sehingga SiLPA akhir adalah Rp 0 (nol rupiah).

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil atau *outcome* program Perangkat Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan tahap pembangunan tahun pertama dari RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026. Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi menggunakan pendekatan substansi perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (T-H-I-S), yang secara implementatif dilakukan melalui:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian program prioritas pembangunan daerah dengan 4 (empat) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026.
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow output priority program*) serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
3. Menjaga dan memastikan semua tahapan perencanaan dilalui dengan baik dan benar serta tepat waktu dengan mengimplementasikan SIPD serta sistem digital lainnya yang terintegrasi.
4. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, baik dari pusat, provinsi, Kota Sukabumi, serta dari unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat.

5. Melibatkan peran aktif seluruh *stakeholder* baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah seperti masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, komunitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kota Sukabumi dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan mempertimbangkan:

1. Visi dan misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025;
2. Analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terkahir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025; dan
3. Isu strategis aktual Kota Sukabumi.

Berdasarkan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terkahir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, capaian pembangunan pada tahap ini ditandai dengan:

1. SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing;
5. Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan; dan
6. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana.

Berdasarkan irisan visi misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, dan isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Sandingan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD,
Isu Strategis Aktual serta Tujuan dan Sasaran RPD
Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
1	Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya	SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia	Kualitas sumber daya manusia (SDM)	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat ● Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ● Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
2	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan			
3	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat			
4	Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi	Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> ● Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa ● Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya 	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah	Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Inovasi di pemerintahan ● Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	<ul style="list-style-type: none"> ● Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis ● Meningkatnya inovasi daerah
6	Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah	Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana	Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas ● Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (hasil analisis)

Adapun secara rinci tujuan, sasaran, outcome, indikator kinerja abeserta targetnya sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi
Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN/ <i>OUTCOME</i>	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Tujuan:						
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,35	5,31	5,33	5,37
Sasaran:						
Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	3,80	4,00	4,20	4,40
Outcome:						
Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	69,3	80	82	85
Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	4,88	5,88	6,38	6,88
	Persentase ketersediaan pangan pokok	Persen	100	100	100	100
Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	0,01	0,01	0,02	0,03

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	Persen	20	40	60	80
Meningkatnya promosi produk lokal	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100
Sasaran:						
Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	29,43	30,93	32,43	33,95
Outcome:						
Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	14	16	19	22
Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	21,78	21,80	21,90	22
	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	4	4	6	7
Tujuan:						
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,40	75,55	75,75	75,80
Sasaran:						
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,55	71,58	71,68	71,77

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Outcome:						
Terpenuhinya SPM Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Persen	88.93	100	100	100
Meningkatnya literasi masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	65.34	70.5	71	72
Sasaran:						
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,31	0,33	0,35	0,37
Outcome						
Terpenuhinya SPM Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	Persen	88.93	100	100	100
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	Persen	6,28	6	5,75	5,5
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persen	100	100	100	100
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	13,64	15,88	18,16	20,44
Meningkatnya kepesertaan JKN	Persentase kepesertaan JKN	Persen	98,43	98,5	98,6	98,7
Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	Persen	64,24	65	65,5	66
Sasaran:						
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	30,899	34,001	35,769	37,736
Outcome:						

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	80	81	82	83
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	80	85	87,5	90
Tujuan:						
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Poin	64,50	65,00	65,25	65,50
Sasaran:						
Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	85,20	86,00	86,20	86,50
Outcome:						
Meningkatnya konektivitas wilayah	Tingkat kemantapan jalan kota	Persen	84,54%	85	86	87
	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	82,85	83,54	83,87	84,2
Meningkatnya pengelolaan sampah dan sanitasi	Cakupan pengelolaan sampah	Persen	99,55	100	100	100
	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persen	57,87%	58,30	58,73	59,16
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Persentas berkurangnya jumlah RTLH	Persen	100,00%	69.44	38.88	0.69

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
	Luasan pengurangan kawasan kumuh	Ha	19,79	15	20	15
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman
	Indeks RTH	m2/orang	25	25,5	26	26,5
Sasaran:						
Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Persen	75,31	75,40	75,55	75,60
Outcome:						
Terpenuhinya SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal tranribmas	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang terselesaikan	Poin	100	100	100	100
Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota	Persen	57,32%	62,18	67,03	71, 89
Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Persen	53	55	56	57
Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana	Persentase pemenuhan SPM kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100

TUJUAN/SASARAN/ <i>OUTCOME</i>	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Tujuan:						
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73,00	74,00	75,00
Sasaran:						
Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73,00	74,00	75,00
Outcome:						
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	Persen	100	100	100	100
	Persentase pencapaian IKU	Persen	100	100	100	100
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persen	96,67	97,33	97,66	98
Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persen	7,68	7,9	8,0	8,5
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online	Persen	100	100	100	100

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persen	45	76	77	78
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Persen	45	80	81	82
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100
	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah	Persen	100	100	100	100
	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase pengelolaan aplikasi informatika yang digunakan dalam pemerintahan	Persen	90	93	95	97
Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan	Persen	100	100	100	100

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Sasaran:						
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Outcome:						
Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Persentase instansi/lembaga yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	100

Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kota Sukabumi, Tahun 2024

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2023-2025 merupakan tahap pembangunan kelima atau terakhir dari RPJPD Kota Sukabumi tahun 2005 - 2025 yang memiliki tema “**Pemeliharaan dan Pengembangan Semua Aspek Pembangunan yang Telah Dilaksanakan pada RPJM sebelumnya**”. Tema pembangunan tersebut menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan RPD yang lebih lanjut akan dijabarkan dalam tema pembangunan setiap tahun dan menjadi pedoman bagi penentuan fokus atau tema pembangunan dalam RKPD tahun 2024 - 2026. Tema pembangunan lima tahunan dalam setiap periode RPJPD disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD dan Penjabarannya ke dalam RKPD



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (hasil analisis)

Rumusan arah kebijakan untuk merasionalkan pilihan strategi harus memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Fokus atau tema pembangunan setiap tahun selama periode RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Tema atau Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2024-2026



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (hasil analisis)

Tema atau fokus pembangunan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahunan untuk perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan RPD. Tema pembangunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, adalah:

“Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan”

Tema di atas memiliki makna bahwa pada tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan. Situasi politik yang cenderung meningkat perlu diantisipasi dengan tetap menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik agar keberlangsungan pembangunan tetap terjaga.

Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu **Melajukan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat** serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Pada prinsipnya ketiga tema tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan melalui upaya penciptaan kondusifitas serta percepatan pembangunan ekonomi sehingga dapat mencapai masyarakat yang mandiri, unggul dan sejahtera.

Dalam pelaksanaan tema diatas, maka harus disandingkan dengan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan daerah sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dilakukan analisis berdasarkan sasaran dan isu strategis RPD, hasil evaluasi RKPD serta kebijakan Provinsi dan Nasional, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Penentuan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
o Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum dioptimalkan	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai penopang perekonomian	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa
		Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengkapitalisasi potensi ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian	
o Ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi belum optimal			Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	
o Belum berkembangnya sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan dan harga bahan pokok				
o Belum optimalnya pembinaan PKL				
o Tingginya alih fungsi lahan termasuk LP2B				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
o Minat masyarakat untuk bertani makin berkurang				
o Distribusi bibit tanaman hortikultura belum optimal				
o <i>Urban farming</i> belum menjadi gerakan masif dalam mendukung ketahanan pangan				
o Belum optimalnya standarisasi budidaya perikanan				
o Fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan belum optimal				
o Belum optimalnya manajemen koperasi				
o Belum optimalnya pola kemitraan antara koperasi dan UMK dengan pengusaha besar				
o Kurangnya promosi produk usaha mikro				
o Belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi usaha mikro				
o Belum tersedianya database koperasi dan usaha mikro				
o Investasi sektor industri belum menarik minat investor			Meningkatkan iklim usaha yang kondusif	
o Potensi investasi belum digali secara optimal				
o Rendahnya IKM produktif				
o Pemanfaatan teknologi bagi industri kecil masih rendah				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
o Pemasaran produk IKM yang masih terbatas				
o Luas wilayah relatif kecil	Dampak PSN dan megaprojek lainnya	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan Kondusifitas Kota
o Belum optimalnya Kota Sukabumi sebagai PKW				
o Adanya disparitas pembangunan infrastruktur				
o Belum optimalnya pengelolaan air bersih				
o Belum optimalnya pengelolaan air limbah				
o Belum disusunnya RDTR				
o Fasilitas RTH publik yang belum optimal				
o Masih adanya RTLH	Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan		Meningkatkan pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman	
o Permukiman kumuh belum sepenuhnya tertangani			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	
o Degradasi lingkungan				
o Alih fungsi lahan yang terus berlangsung				
o Belum optimalnya pengelolaan persampahan				
o Kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup masih kurang				
o Risiko bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir cukup besar		Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan penanganan bencana	
o Belum adanya peralatan untuk				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
mendeteksi bencana				
o Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan masih belum optimal	Pemilu dan pilkada serentak 2024	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan situasi kota yang kondusif	Peningkatan Kondusifitas Kota
o Konflik sosial masih sering terjadi				
o Ormas dan LSM masih banyak yang belum tertib administrasi				
o Masih terdapat anak di bawah umur yang tergabung dalam Ormas dan LSM				
o Adanya kesenjangan terkait distribusi kekayaan, produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi, dan ketahanan dalam menghadapi goncangan	Kualitas SDM	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat	
o Akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat miskin perlu ditingkatkan				
o Komponen daya beli masyarakat sebagai pembentuk IPM perlu ditingkatkan				
o Angka putus sekolah perlu ditekan				
o Angka melanjutkan sekolah antarjenjang pendidikan perlu ditingkatkan				
o Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga terbatas		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
o Asupan gizi masyarakat perlu ditingkatkan		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu kesehatan masyarakat	
o Angka kesakitan masyarakat perlu ditekan				
o Terdapat 4 kelurahan yang memiliki angka prevalensi <i>stunting</i> tinggi				
o Pelayanan umum di beberapa kecamatan masih belum optimal	Inovasi di pemerintahan	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif
o Rekomendasi oleh APIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti PD		Meningkatnya inovasi daerah	Penguatan ekosistem inovasi	
o Evaluasi program oleh APIP belum sepenuhnya dilakukan			Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	
o Belum idealnya jumlah ASN				
o Penghapusan tenaga honorer				
o Belum tersedianya data center				
o Terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi				
o Belum optimalnya pengamanan informasi				
o Belum semua arsip didigitalisasi				
o Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral				
o Partisipasi dan distribusi data dari pengguna/PD terhadap kebutuhan				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
pengguna data yang berkualitas sangat rendah				

Sumber: Analisis Bappeda, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kondusifitas Kota

Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan. Situasi politik yang cenderung meningkat perlu diantisipasi dengan tetap menjaga dan meningkatkan kondusifitas dan stabilitas kota dari berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan dan politik. Hal tersebut agar keberlangsungan pembangunan tetap bisa terjaga dan masyarakat dapat melakukan aktivitas dan kreatifitas sebagaimana biasanya.

2. Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa

Sesuai dengan Visi RPJPD bahwa Kota Sukabumi sebagai pusat peragangan dan jasa yang berkualitas, maka kedua sektor ini harus terus menjadi prioritas dalam pembangunan. Sektor perdagangan dapat dioerkuat juga dengan optimalisasi sektor pariwisata yang nantinya tentu akan berdampak pada meningkatkan sektor perdagangan. Sektor jasa di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya tentu harus tetap menjadi prioritas, karena memang itu sebuah keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh Kota Sukabumi.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif

Pelayanan publik merupakan sebuah kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat, untuk itu maka seluruh jenis pelayanan publik harus terus ditingkatkan kualitasnya. Pelayanan publik merupakan salah satu bagian dari agenda reformasi birokrasi yang juga harus senantiasa di implementasikan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dimana didalamnya terdapat pelayanan publik maka harus dilakukan secara kreatif dengan berbagai inovasi di perangkat daerah sehingga dapat meningkatkan indeks reformasi birokrasi serta juga indeks inovasi daerah yang pada

akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain prioritas pembangunan daerah, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran telah ditentukan juga program prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 yang disusun berdasarkan isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Program prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksanaan dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program prioritas pembangunan daerah disajikan berdasarkan tujuan, sasaran dan *outcome* dari RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Dengan sifat program prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya harus diutamakan.

Perumusan program prioritas bertujuan untuk menggambarkan rangkaian “kerja” yang dibutuhkan untuk mencapai “kinerja” tujuan dan sasaran pembangunan. Program prioritas tersebut dihasilkan melalui mekanisme *cascading* tujuan, sasaran, dan *outcome* pembangunan. Proses perumusan program prioritas melalui mekanisme *cascading* dinilai lebih logis dan lebih dapat menjaga kesinambungan tujuan dan sasaran dengan program prioritas yang dihasilkan.

Berdasarkan *cascading* yang dilakukan, program prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 terdiri dari 41 program. Program prioritas yang dihasilkan juga telah disesuaikan dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program prioritas Kota Sukabumi tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Pelayanan Penanaman Modal	DPMPSTSP
		Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Stabilisasi Harga Barang	Diskumindag
			Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKP3
		Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskumindag
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskumindag
	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya promosi produk lokal	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Diskumindag
		Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disporapar
		Meningkatnya daya tarik wisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporapar
			Pemasaran Pariwisata	Disporapar
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Terpenuhinya SPM pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud
		Meningkatnya literasi masyarakat	Pembinaan Perpustakaan	Dispusip
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terpenuhinya SPM kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan	Dinkes
		Meningkatnya akses dan mutu	Perorangan dan	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		<p>elayanan kesehatan</p> <p>Meningkatnya kepesertaan JKN</p> <p>Meningkatnya pembinaan keluarga berencana</p>	<p>Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</p>	<p>Daldu KB P3A</p>
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	<p>Meningkatnya kompetensi tenaga kerja</p> <p>Meningkatnya penempatan tenaga kerja</p>	<p>Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Penempatan Tenaga Kerja</p>	<p>Disnaker</p> <p>Disnaker</p>
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	<p>Meningkatnya konektivitas wilayah</p> <p>Meningkatnya pengelolaan persampahan dan sanitasi</p> <p>Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman</p> <p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</p>	<p>Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>Pengelolaan Persampahan</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>Kawasan Permukiman</p> <p>Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</p>	<p>DPUTR</p> <p>Dishub</p> <p>DLH</p> <p>DPUTR</p> <p>DPUTR</p> <p>DPUTR</p> <p>DLH</p> <p>DLH</p>
	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	<p>Terpenuhinya SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p> <p>Meningkatnya kualitas</p>	<p>Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan</p>	<p>Satpol PP Damkar</p> <p>Kesbangpol</p>

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		kerukunan umat beragama	Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
		Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
		Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Penanggulangan Bencana	BPBD
		Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana	Penanganan Bencana	Dinsos
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD
		Meningkatnya kapasitas ASN	Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Perekonomian dan Pembangunan	Setda-BPBJ
		Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas	Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda-Organisasi

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		elayanan dan kebijakan publik	Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda-Hukum
			Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan
		Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Aplikasi Informatika	Diskominfo
		Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda

Sumber: RPD Kota Sukabumi 2024-2026

Prioritas pembangunan dan program prioritas ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 dengan isu strategis pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	1) Pelayanan Penanaman Modal 2) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			<ul style="list-style-type: none"> 3) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 4) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 5) Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 6) Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2	Dampak PSN dan megaprojek lainnya	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3) Pemasaran Pariwisata
3	Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan	Peningkatan Kondusifitas Kota	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan Jalan 2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3) Pengelolaan Persampahan 4) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5) Perumahan dan Kawasan 6) Permukiman Kumuh 7) Kawasan Permukiman 8) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 9) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 10) Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 11) Penanggulangan Bencana 12) Penanganan Bencana
4	Kualitas SDM	Peningkatan Kondusifitas Kota	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan Pendidikan 2) Pembinaan Perpustakaan 3) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 4) Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 5) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 6) Penempatan Tenaga Kerja
5	Inovasi di pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penelitian dan Pengembangan Daerah 2) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			3) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Pengelolaan Keuangan Daerah 5) Pengembangan Sumber Daya Manusia 6) Perekonomian dan Pembangunan 7) Penyelenggaraan Pengawasan 8) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 10) Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 11) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 12) Aplikasi Informatika 13) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6	Pemilu dan pilkada serentak 2024	Peningkatan Kondusifitas Kota	1) Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2) Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka apabila kita sandingkan antara isu strategis, prioritas pembangunan dan program prioritas terdapat keterkaitan yang sangat erat. Isu strategis yang selanjutnya menjadi prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dapat kita petakan diakomodir pada program prioritas yang mana, sehingga kita dapat memastikan bahwa isu strategis dan prioritas pembangunan yang bermula dari berbagai permasalahan dan kondisi terkini Kota Sukabumi dapat diselesaikan melalui berbagai program prioritas yang akan dijalankan pada Tahun 2024.

Apabila kita gambarkan lebih detail, maka keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.3

Keterkaitan Isu Straeis dengan Prioritas Pembangunan



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi (diolah)

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan salah satu dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan, maka ketiganya harus bisa disandingkan dan bisa terlihat jelas arah kebijakan mana yang menjadi dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan tersebut. Berikutnya dalam proses implementasi prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan bisa sesuai dengan harapan awal ketika proses penyusunan perencanaan disusun dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian target-target kinerja yang sudah ditetapkan. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan hubungan antara prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan dengan 36 (tiga puluh enam) arah kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tabel 4.5
Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Program Priotas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
1	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatkan pelayanan penanaman modal
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Memberdayakan pelaku UMKM
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatkan kualitas sarana perdagangan
		Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal
		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Memanfaatkan dan melindungi HKI
		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatkan obyek daya tarik wisata
		Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan pemasaram wisata
		Pengelolaan Pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan
		Pembinaan Perpustakaan	Meningkatkan literasi masyarakat
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)
		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja
		Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan penempatan tenaga kerja
2	Peningkatan Kondusifitas Kota	Penyelenggaraan Jalan	Meningkatkan kualitas jalan kota
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
		Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengelolaan persampahan
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Mengurangi luas kawasan kumuh
		Kawasan Permukiman	Mengurangi RTLH
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati
		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatkan kerukunan umat beragama

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana
		Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana
		Penanganan Bencana	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatkan transparansi pemerintahan
		Penyelenggaraan Pengawasan	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing
		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Aplikasi Informatika	
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi		
	Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi		
	Implementasi pemanfaatan inovasi		

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026. Pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan

melalui berbagai program pembangunan yang ada di seluruh perangkat daerah juga melalui program prioritas pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih fokus dan terarah, maka telah ditetapkan tema pembangunan untuk setiap tahunnya. Tema tersebut tentunya harus bisa sinergi dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan agar dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam menentukan prioritas pembangunan supaya sesuai dengan situasi dan kondisi terkini di lapangan, maka harus melakukan berbagai sinkronisasi dengan berbagai kepentingan diantaranya adalah pokok-pokok pikiran DPRD. Keterkaitan prioritas pembangunan dengan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan
Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Peningkatan Kondusifitas Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan peran dan fungsi Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) yang ada di setiap RW.2. Pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran sesuai dengan kriteria/Aturan yang berlaku.3. Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus tepat sasaran sesuai dengan Kriteria/Aturan yang berlaku.4. Untuk segera membuat <i>Master plan Drainase</i> sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka menanggulangi banjir.5. Meningkatkan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan secara merata, baik berupa pavingisasi, betonisasi dan pengaspalan.6. Dalam pelaksanaan kegiatan yang besumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota harus bersinergi.7. Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara membangun rusunami, Rusunawa, Rumah murah bersubsidi.8. Pendataan RTLH serta penaggulangan nya.9. Mengadakan Pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacat Berbasis potensi/kebutuhan.10. Menyediakan rumah singgah bagi para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).11. Melakukan Bimbingan dan Konsultasi terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Melibatkan Lembaga Konsultasi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		<p>Kesejahteraan Keluarga (LK3).</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Melakukan Pendataan dan Mentertibkan Hak Kepemilikan Tanah yang belum Bersertifikat. 13. Mengamankan aset-aset milik Pemerintah Kota. 14. Memberikan Bantuan Operasional kepada para Petugas Pos Yandu Balita dan Lansia. 15. Dalam rangka melestarikan, Mengelola dan mengembangkan Gedung/Tempat peninggalan Sejarah/Cagar Budaya perlu adanya penambahan Anggaran. 16. Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah 17. Tersedianya <i>database</i> tentang Produk-produk Hukum baik peraturan daerah dan peraturan wali kota (Perwali)nya. 18. Memverifikasi peraturan daerah yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan atau peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. 19. Tersedianya sarana dan prasarana yang representative. 20. Meningkatkan kerukunan hidup beragama. 21. Meningkatkan peran lembaga/<i>stake holders</i> dalam rangka mengantisipasi/mengatasi gejolak dalam kehidupan kerukunan umat beragama. 22. Menjaga kondisifitas antar partai politik di Kota Sukabumi. 23. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana. 24. Menciptakan sistem proteksi dalam bencana kebakaran. 25. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam setiap pembangunan gedung di Kota Sukabumi. 26. Perlunya standarisasi gedung/bangunan untuk mengantisipasi bencana/kebakaran. 27. Penanganan <i>Covid-19</i> termasuk penyediaan APD, tempat tidur, pembangunan sarana prasarana kesehatan dan pengadaan mobil siaga desa; 28. Penyelesaian pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bagi warga yang tidak mampu; 29. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan termasuk penambahan ruang kelas baru, penambahan kuota bantuan bagi pelajar SMA/SMK, beasiswa bagi mahasiswa, peningkatan sarana prasarana SLB dan pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU); 30. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegah banjir; 31. Pembangunan jalan baru, perbaikan/perawatan jalan yang ada dan pembangunan jalan untuk lokasi perbatasan yang sulit dijangkau;
2	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menginformasikan setiap ada Lowongan Pekerjaan (Loker) kepada Masyarakat. 2) Melakukan Koordinasi dengan pihak Perusahaan dalam penentuan Hak-hak dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan.

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		<ol style="list-style-type: none"> 3) Mengadakan pelatihan keterampilan dalam rangka stimulasi pertumbuhan UMKM di Kota Sukabumi. 4) Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, khususnya olahan pangan masyarakat. 5) Peningkatan pemantauan harga sembako untuk menjamin tersedianya kebutuhan makanan pokok. 6) Meningkatkan dan memfasilitasi pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). 7) Segera merealisasikan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan dengan pola <i>typing fee</i>. 8) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM. 9) Pengawasan dan pembinaan bagi pelaku koperasi dan UMKM. 10) Hubungan kesinambungan antara Dinas Koperasi dan UMKM pasca selesainya pembinaan. 11) Mempermudah regulasi/aturan untuk menarik investor di Kota Sukabumi. 12) Menyediakan Mall pelayanan perijinan 1 (satu) pintu di DPMPPTSP. 13) Pemberdayaan potensi pariwisata lokal khususnya di kelurahan-kelurahan. 14) Meningkatkan kultur pariwisata di masyarakat khususnya pelaku wisata. 15) Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri. 16) Program destinasi wisata khususnya paket wisata unggulan melalui Sukabumi <i>Great sale</i>. 17) Promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri 18) Pengembangan SDM dan profesionalisme pariwisata. 19) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 20) Pemantauan kesehatan hewan yang dikonsumsi masyarakat. 21) Peningkatan keanekaragaman industri tanaman pertanian. 22) Monitoring peredaran daging di pasar-pasar tradisional secara rutin dan terjadwal. 23) Pemantauan higienes dan halal makanan yang berbahan daging di Hotel, Rumah Makan, dan Warung Makan di Kota Sukabumi. 24) Monitoring dan antisipasi terhadap kenaikan harga, mutu, dan penyediaan sembilan bahan pokok. 25) Membuka dan memperluas akses pemasaran baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional. 26) Peningkatan pengawasan dan pembinaan pasar tradisional. 27) Perlindungan bagi pelaku pasar tradisiona agar terjaga eksistensinya terhadap persaingan pasar modern.

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		<p>28) Penataan dan penertiban pasar yang beralih fungsi.</p> <p>29) Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar tradisional secara optimal, terutama terkait jaringan instalasi listrik di Pasar-Pasar tradisional secara keseluruhan.</p> <p>30) Mengoptimalkan Pendapatan pasar tradisional.</p> <p>31) Pemantauan perkembangan pasar Kreatif sehingga diharapkan ada dampak yang positif terhadap pasar Tradisional.</p> <p>32) Menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk berwirausaha.</p> <p>33) Proteksi terhadap keberadaan industri kecil dan menengah yang ada di Kota Sukabumi serta evaluasi dan memperketat kontrol terhadap produk-produk impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>34) Pembangunan tempat pameran yang memadai untuk usaha- usaha yang ada di Kota Sukabumi maupun di Luar Kota Sukabumi.</p> <p>35) Peningkatan kerja sama daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah daerah tujuan transmigrasi yang secara infrastruktur memadai.</p> <p>36) Peningkatan pembekalan Calon Transmigran yang akan dikirim dengan pelatihan yang memadai.</p> <p>37) Peningkatan mutu dan layanan air bersih yang layak pakai untuk masyarakat.</p> <p>38) Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan air yang layak bagi masyarakat kota Sukabumi.</p> <p>39) Menekan tingkat kebocoran air.</p> <p>40) PDAM diharapkan memberikan kebutuhan air bersih yang maksimal kepada masyarakat Sukabumi.</p>
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	<p>1) Mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah agar dalam perencanaan pembangunan lebih akurat/tidak berubah-ubah, dan dapat terintegrasi antara Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.</p> <p>2) Dalam melakukan perencanaan memperhatikan prinsip partisipasi, kesinambungan dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Untuk perencanaan pembangunan Kota Sukabumi agar memperhatikan keseimbangan wilayah.</p> <p>3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring di sektor PAD.</p> <p>4) Kajian potensi riil PAD dan peningkatan implementasi dari hasil kajian tersebut secara transparan yang dilakukan oleh tim independen.</p> <p>5) Sistem Pendapatan dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran diupayakan secara <i>online</i>.</p> <p>6) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi apabila regulasi tentang</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		<p>penghapusan PBB dan BPHTB jadi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>7) Evaluasi dan laporan hasil PAD dan penggunaan secara periodik (per Triwulan) kepada DPRD.</p> <p>8) Perlunya ada penambahan Formasi / Pengangkatan Guru Agama baik melalui Seleksi P3K maupun seleksi CPNS .</p> <p>9) Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan Tunjangan Kinerja</p> <p>10) Terselenggaranya pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas PNS</p> <p>11) Meningkatkan peran kelembagaan kelurahan dan kecamatan dalam rangka partisipasi pembangunan.</p> <p>12) Mengusulkan peningkatan anggaran bantuan ke kelurahan dan kecamatan.</p> <p>13) Tersedianya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p>

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Pemerintah Kota Sukabumi telah mensinkronkan program-program pembangunan daerah Tahun 2024 untuk pencapaian target tersebut. Berikut program-program pembangunan tersebut.

Tabel 4.7
Perbandingan Program Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024
dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming)
Pembangunan Nasional Tahun 2024

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 1 TANPA KEMISKINAN	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. • Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. • Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 5. Program Pengendalian Penduduk 6. Program Pengelolaan Pendidikan 7. Program Pengelolaan Pendidikan 8. Program Pencatatan Sipil
Tujuan 2 TANPA KELAPARAN	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. • Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. • Target 2.3 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. • Target 3.3. pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. • Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. • Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. • Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. • Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. • Target 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. • Target 3.b.1(a) Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. • Target 3.c.1* Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 7. Program Pencatatan Sipil
Tujuan 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. • Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. • Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. • Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global • Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
Tujuan 5 KESETARAAN GENDER	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. • Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. • Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. • Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. • Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reuiu dari konferensi-konferensi tersebut. • Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua • Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. • Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. • Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. • Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. 	<p>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)</p>
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. 	
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. • Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. • Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. • Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi 	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<p>pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. • Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. 	
<p>Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. • Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. • Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. 	
<p>Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. • Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. • Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. 	
<p>Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan</p>	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none"> Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh. 	<ol style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) Program Penanggulangan Bencana
<p>Tujuan 12 Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Target 12.4 ada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. 	<ol style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pengelolaan Persampahan
<p>Tujuan 14 Ekosistem Lautan</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Target 14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization. 	
<p>Tujuan 16 PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. 	<ol style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Perekonomian Dan Pembangunan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. • Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. • Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. • Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. • Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. • Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. • Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program Kepegawaian Daerah 4. Program Pencatatan Sipil
Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. • Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. • Target 17.8 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. • Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. • Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<p>dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di BAB II serta di sinkronkan dengan kondisi keuangan dan kebijakan belanja yang sudah ditetapkan pada Bab III, maka beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan gaji dan tunjangan untuk PNS, P3K, THL dan TKS di beberapa Perangkat Daerah sesuai hasil perhitungan atau prognosis bulan Juni Tahun 2024;
- 2) Pemenuhan kebutuhan untuk pencapaian IKU Kepala Daerah di beberapa Perangkat Daerah;
- 3) Pemenuhan kebutuhan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di Dinas Pendidikan, Kesehatan, PUTR, dan Sosial;
- 4) Pemenuhan beberapa program prioritas daerah;
- 5) Pemenuhan kebutuhan dalam mendukung program Nasional dan Provinsi seperti: PBI JKN di Dinas Kesehatan, dan Stunting;
- 6) Pemenuhan untuk mendukung Indikator Kinerja yang belum tercapai di beberapa Perangkat Daerah terutama yang merupakan Indikator PK dari Perangkat Daerah;
- 7) Pemenuhan untuk kegiatan penunjang seperti belanja operasional kegiatan di Perangkat Daerah.

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah serta antar pusat dan daerah, maka prioritas pembangunan Kota Sukabumi harus diselaraskan dengan prioritas provinsi dan nasional. Prioritas pembangunan Kota Sukabumi selanjutnya diterjemahkan ke dalam program prioritas pembangunan, serta dijabarkan kembali melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana tercantum lampiran perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024. Program prioritas nasional pada Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas nasional tersebut, maka telah dilakukan pemetaan pencapaian prioritas nasional berdasarkan program perencanaan pembangunan yang bisa mendukung pencapaiannya. Lebih jelas pemetaan tersebut sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8

Sinkronisasi Program Prioritas dengan Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PN.01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan										
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan		Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa						
		2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati								
		3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi								
		4. Peningkatan pemenuhan energi domestik								
		5. Pengembangan industri pendukung EBT			Program Pengelolaan Sistem Informasi	Persentase Pameran yang Dilaksanakan dan Informasi Industry secara	Persen	100	746.216.000	DISKUMI NDAG

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Pengembangan waduk multiguna								
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan pokok	Persen	100	3.057.279.700	DKP3
		2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	Persen	25	5,680,000	DKP3
		3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar								
		4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan			Program Pengendalian dan Penanggulangan	Persentase Luas Lahan Pertanian yang	Persen	30	8.629.500	DKP3

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		digitalisasi pertanian			gan Bencana Pertanian	Mengikuti AUTP				
		5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional								
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman , perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Peningkatan Kondusifitas Kota	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan pokok	Persen	100	3.057.279.700	DKP3
		2. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas Budidaya Perikanan	Ton/ha	25,87	509.991.150	DKP3
		3. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Ketersediaan Ikan	Persen	110	59.020.000	DKP3

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi	1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	0,01	2.066.717.450	DISKUMI NDAG
		2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha								
		3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	19,83	81.400.000	DISKUMI NDAG
		4. Peningkatan penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha			Program Pengembangan UMKM	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Persen	0,47	350.000.000	DISKUMI NDAG
		5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial								
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di	1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Persen	60	1.312.556.150	DISKUMI NDAG

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	sector riil, dan industrialisasi	terintegrasi hulu-hilir								
		2. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	21,80	3.888.779.000	DISPORA PAR
		3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	16	44.197.500	DISPORA PAR

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan			Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	80	577.988.150	DPMPTSP
		5. Pengembangan industri halal								
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	80	577.988.150	DPMPTSP
		2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor								
		3. Pengelolaan impor	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif			Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Dilaksanakan	Persen	100	75.470.000	DISKUMI NDAG
		5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
		6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan desinasi branding, dan produk kreatif	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Persen	60	1.312.556.150	DISKUMI NDAG
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan		Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa						

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
		3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Persen	60	1.312.556.150	DISKUMI NDAG
		4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata								
PN.02 Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan										
1	Pembangunan Wilayah Sumatera	1. Pengembangan Kawasan strategis	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata							
			Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan							

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	2. Pengembangan sektor unggulan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Persen	60	1.312.556.150	DISKUMI NDAG
3	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	3. Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi)	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
4	Pembangunan Wilayah Kalimantan	4. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)	Gerakan membangun desa							
			Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup							

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pembangunan Wilayah Sulawesi	5. Kelembagaan dan keuangan daerah	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah							
6	Pembangunan Wilayah Maluku									
7	Pengembangan Wilayah Papua									
PN.03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing										
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan		Peningkatan Kondusifitas Kota	Porgram Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan adminisrai kependudukan	Persen	100	146.722.000	DISDUKC APIL
		2. Integrasi sistem administrasi kependudukan			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Dokumen Pendaftaran Penduduk	persen	92	380.565.600	DISDUKC APIL
		3. Pendampingan layanan terpadu		Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	100	120.875.500	DISDUKC APIL
		4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan			Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	persen	12.5	267.539.400	DALDUK KBP2A

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pengendalian penduduk								
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	1. Sistem jaminan sosial nasional	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	persen	98,5	71.311.229.996	DINKES
		2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang sesuai standar	Persen	100	387.876.000	DINSOS
		3. Perlindungan sosial adaptif			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang bermutu	Persen	100	599.458.850	DINSOS

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Kesejahteraan sosial			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS).	Persen	50	1.116.090.000	DINSOS
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	persen	65	3.045.514.613	DALDUK KBP2A
		2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	persen	92	71.311.229.996	DINKES
		3. Peningkatan pengendalian penyakit				Prevalensi stunting pada balita	persen	6		DINKES

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kesehatan	persen	100	3.483.008.132	DINKES
		5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pembinaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	persen	100	524.031.000	DINKES
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	persen	100	85.749.388.700	DISDIKBUD
		2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun								
		3. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan guru	angka	0.2	59.889.800	DISDIKBUD
		4. Penjaminan mutu pendidikan			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Yang mengembangka	persen	40	-	DISDIKBUD

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						n Kurikulum Muatan Lokal				
		5. Peningkatan tata kelola pendidikan								
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak		Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kota	persen	79	94.350.000	DALDUK KBP2A
		2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan			Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	persen	0.008	183.917.050	DALDUK KBP2A
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga	persen	72.5	451.097.510	DALDUK KBP2A
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	Dokumen	2	24.999.900	DALDUK KBP2A

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	persen	0,034	389.179.200	DALDUK KBP2A
		3. Kualitas pemuda			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Diberdayakan	Persen	80	906.225.000	DISPORAPAR
6	Pengentasan kemiskinan	1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	0,01	2.066.717.450	DISKUMI NDAG
		2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial								
		3. Reformasi agraria	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Perhutanan sosial	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	81	440.000.000	DISNAKER
		2. Prestasi olahraga			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Raihan Medali pada Event Olah Raga Tingkat Provinsi dan Nasional	Medali	18	2.995.976.700	DISPORAPAR
PN.04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan										

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti		Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	40	-	DISDIKBUD
		2. Revolusi mental dalam tata kelola		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Menenuhi Aspek Penilaian	Persen	80	174.267.404.643	SETDA

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter								
		4. Pembangunan dan kebudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila								
		5. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Kebangsaan	persen	100	835.136.948	KESBAN GPOL

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan mempertahankan jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan Sejarah Lokal	persen	60	97.889.200	DISDIKBUD
		2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	jumlah	13	35.000.000	DISDIKBUD

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif								
		4. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan								
3	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	1. Peningkatan budaya literasi	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	70.5	4.866.982.700	DISPUSIP
		2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Prosentase koleksi budaya etnis dan naskah kuno yang dimiliki	Persen	1.2	-	DISPUSIP

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase PD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	969.797.000	BAPPEDA
		4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	70.5	4.866.982.700	DISPUSIP
PN.05 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar										
1	Infrastruktur pelayanan dasar	1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Kawasan Permukiman	Luasan Pengurangan Kawasan Kumuh	Ha	10	4.308.000.000	DPUTR
		2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir WS Kewenangan Kota	Persen	57.37	8.560.427.000	DPUTR

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Minum yang Layak dan Aman	Persen	100	3.577.766.310	DPUTR
		3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	57.95	4.028.889.000	DPUTR
		4. Keselamatan dan keamanan transportasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	83,54	4.014.813.227	DISHUB
					Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Persen	85.15	16.152.809.015	DPUTR
		5. Ketahanan kebencanaan infrastruktur	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase RTHKP dalam Kondisi Baik	Persen	78.95	3.079.772.000	DPUTR

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penanggulangan Risiko Bencana							
		6. Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang Terindungi Infrastruktur Pengendali Banjir WS Kewenangan Kota	Persen	57.37	8.560.427.000	DPUTR
2	Infrastruktur ekonomi	1. Konektivitas jalan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Persen	85.15	16.152.809.015	DPUTR
		2. Konektivitas darat	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	83,54	4.014.813.227	DISHUB

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Infrastruktur perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)	1. Transportasi perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	83,54	4.014.813.227	DISHUB
		2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase RTHKP dalam Kondisi Baik	Persen	78.95	3.079.772.000	DPUTR
		3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Minum yang Layak dan Aman	Persen	100	3.577.766.310	DPUTR
		4. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Kawasan Permukiman	Luasan Pengurangan Kawasan Kumuh	Ha	10	4.308.000.000	DPUTR

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Transformasi digital	1. Penuntasan infrastruktur TIK	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Persen	93	373.239.000	DISKOMINFO
		2. Pemanfaatan infrastruktur TIK	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan							
		2. Fasilitas pendukung transformasi digital	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks KIP	Persen	90	547.674.250	DISKOMINFO
PN.06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim										

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	1.637.489.400	DLH
		2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	1.637.489.400	DLH
		3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3	Persen	100	23.980.000	DLH
		4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	100	54.483.650	DLH

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Lingkungan Hidup							
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1. Penanggulangan bencana	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Poin	0,57	3.402.600.700	BPBD
		2. Peningkatan ketahanan iklim	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana							
3	Pembangunan rendah karbon	1. Pembangunan energi berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kondusifitas Kota						

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Pemulihan lahan berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah yang Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persen	70	130.000.000	DPUTR
		3. Pengelolaan limbah	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	57.95	4.028.889.000	DPUTR
		2. Pengembangan industri hijau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
PN.07 Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik										
1	Konsolidasi Demokrasi	1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi		Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas	Persentase Konflik Sosial Yang Diantisipasi	persen	100	26.089.200.300	KESBAN GPOL

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja	Point	61	485.545.495	BKPSDM
						Nilai Kriteria Pengembangan Karir	Point	63		
		2. Transformasi Pelayanan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Persen	3,40	9.179.173.453	SETDA
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	1.845.192.200	KECAMATAN
		3. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan	Persen	80	7.013.328.487	SETDA

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Confidence Building Measures (CBM)</i>								
		3. Penguatan Keamanan Laut								
		4. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas	Persen	100	3.180.994.500	SATPOLP P
		5. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Persen	93	373.239.000	DISKOMI NFO
JUMLAH									381,153,779,657	

Sumber: Hasil Analisa Bappeda, 2024

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota serta Forum Perangkat Daerah (FPD) di seluruh Perangkat Daerah diluar Kecamatan. Musrenbang dan FPD menjadi media/sarana untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kota Sukabumi. Selanjutnya pada perubahan anggaran ini dilakukan beberapa penyesuaian atas hasil evaluasi kinerja pada Triwulan I, sertamelihat kondisi terkini beberapa capaian pembangunan.

Pada pelaksanaan perubahan RKPD ini, penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2024 tetap berpedoman pada RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026 pada tahun berkenaan dengan memperhatikan hasil penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah khususnya yang berasal dari dana transfer dan SiLPA, serta memperhatikan keterkaitannya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

5.1 Rekapitulasi Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana kegiatan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2024, bahwa untuk tujuan optimalisasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024, diperlukan perubahan anggaran baik untuk penambahan sub kegiatan, adanya penghapusan kegiatan, pergeseran/ perubahan pagu, serta penambahan dan pengurangan output sub kegiatan.

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Sukabumi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta

urusan lainnya sebagai pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu mencakup pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota Sukabumi 2005-2025, tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, dan melanjutkan program-program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, untuk mewujudkan belanja yang memenuhi azas keadilan, kepatutan, dan rasionalitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.

Dalam upaya pencapaian target-target, proses pengalokasian anggaran harus sejalan dengan perencanaan pada indikator-indikator program/kegiatan. RKPD Perubahan Tahun 2024 sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan APBD dapat berperan sebagai alat dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sukabumi.

Fokus utama dalam perubahan RKPD Tahun 2024 ini adalah untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, prioritas pembangunan, penyusunan RPJPD serta pemenuhan program di setiap perangkat daerah disesuaikan dengan prioritas dan ketersediaan anggaran.

Secara rinci perubahan pagu anggaran perangkat daerah pada perubahan RKPD Tahun 2024 ini tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Pagu Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI 2024	PERUBAHAN PARSIAL	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5	5 (5-4)	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	259,000,738,343	259,000,738,343	260,191,874,343	1,191,136,000	0.46
2	Dinas Kesehatan	487,934,829,256	496,565,188,576	509,510,231,141	12,945,042,565	2.54
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	55,217,039,010	64,785,784,690	66,655,784,690	1,870,000,000	2.81
4	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	13,257,933,662	13,757,907,662	14,226,884,915	468,977,253	3.30
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,085,263,009	6,930,263,009	7,119,566,019	189,303,010	2.66
6	Dinas Sosial	7,396,556,001	7,396,556,001	7,726,085,601	329,529,600	4.27
7	Dinas Tenaga Kerja	4,354,449,939	4,354,449,939	4,508,504,511	154,054,572	3.42
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	12,507,237,357	12,507,237,357	12,506,877,357	-360,000	0.00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	14,079,745,744	16,721,344,744	17,312,760,450	591,415,706	3.42
10	Dinas Lingkungan Hidup	30,782,065,257	38,418,486,617	38,941,102,617	522,616,000	1.34
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,551,177,073	6,625,426,983	6,868,936,983	243,510,000	3.55
12	Dinas Perhubungan	18,851,474,828	20,239,494,193	20,422,494,193	183,000,000	0.90
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,625,717,431	6,625,717,431	6,916,342,431	290,625,000	4.20
14	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	14,650,795,222	14,650,795,222	14,922,875,222	272,080,000	1.82
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,360,925,915	6,360,925,915	6,702,234,915	341,309,000	5.09
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14,107,176,782	14,107,176,782	14,879,942,864	772,766,082	5.19
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10,101,036,084	10,132,564,574	10,570,134,574	437,570,000	4.14
18	Sekretariat Daerah	46,697,744,467	48,866,413,690	52,570,813,490	3,704,399,800	7.05

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI 2024	PERUBAHAN PARSIAL	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5	5 (5-4)	7
19	Sekretariat DPRD	55,438,337,093	55,438,337,093	57,587,987,093	2,149,650,000	3.73
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17,268,790,873	17,268,790,873	18,871,070,873	1,602,280,000	8.49
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	59,139,635,466	55,684,776,216	58,512,179,237	2,827,403,021	4.83
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,495,509,690	7,578,031,830	7,834,281,830	256,250,000	3.27
23	Inspektorat Daerah	9,727,954,934	9,727,954,934	10,236,301,453	508,346,519	4.97
24	Kecamatan Cikole	14,065,128,460	14,065,128,460	14,177,128,460	112,000,000	0.79
25	Kecamatan Gunung Puyuh	10,363,089,687	10,363,089,687	10,463,109,687	100,020,000	0.96
26	Kecamatan Citamiang	11,553,750,831	11,553,750,831	11,630,290,831	76,540,000	0.66
27	Kecamatan Warudoyong	12,329,614,599	12,329,614,579	12,400,609,579	70,995,000	0.57
28	Kecamatan Baros	9,085,084,841	9,085,084,841	9,203,594,841	118,510,000	1.29
29	Kecamatan Lembur Situ	11,076,899,319	11,076,896,442	11,206,896,442	130,000,000	1.16
30	Kecamatan Cibeureum	10,207,882,414	10,207,882,414	10,280,962,414	73,080,000	0.71
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32,515,238,307	32,515,238,307	32,847,638,307	332,400,000	1.01
JUMLAH TOTAL USULAN RKPD		1,272,828,821,894	1,304,941,048,235	1,337,805,497,363	32,864,449,128	2.46

Sumber: SIPD (diolah)

5.2 Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Secara umum program prioritas terkait erat dengan upaya pencapaian sasaran daerah, dimana sasaran daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, Sasaran dijabarkan ke dalam indikator sasaran, yang dijabarkan kembali melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, Dengan demikian, maka diharapkan sasaran daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai dari akumulasi output dari setiap pelaksanaan kegiatan,

Daftar kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disajikan dalam bentuk Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) menurut kelompok Perangkat Daerah pada Dokumen Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 atau **Buku II**, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024,

BAB VI

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka Ekonomi Daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD yang memuat kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan Pembangunan Daerah melalui program-program Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (PPASP) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

Akhirnya semoga perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Semoga seluruh pihak yang terkait dapat berkontribusi aktif dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan pemantapan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing daerah.

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI